



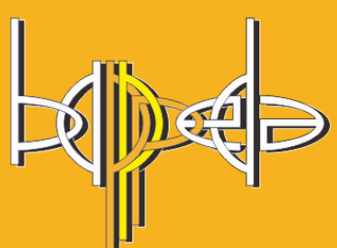
PEMERINTAH
KOTA SURAKART

Laporan Akhir

KAJIAN

INDEKS DAYA SAING DAERAH

KOTA SURAKARTA



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

TAHUN 2021



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

LAPORAN AKHIR

**KEGIATAN:
PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI**

**SUB KEGIATAN:
DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF**

**PEKERJAAN:
BELANJA JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN KAJIAN INDEKS
DAYA SAING DAERAH**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SURAKARTA**

**Jln. Jend. Sudirman No. 2 Surakarta Telp. 655277 – 642020 (psw.405)
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Penyusunan Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan dari Kegiatan Kajian Indeks Daya Saing Daerah ini yaitu untuk Menyusun Dokumen Kajian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Surakarta Tahun 2021 yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi (1) Mengidentifikasi dan memetakan permasalahan Indeks Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2021; (2) Menganalisis trend Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta dari Tahun 2018 hingga 2021; (3) Menyusun proyeksi Indeks Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2022; (4) Menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan hasil analisis Indeks Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2021; (5) Menyusun rekomendasi recovery pemulihan ekonomi dan rekayasa sosial masyarakat Kota Surakarta di masa pandemi *Covid 19*.

Dengan menyadari bahwa kajian ini masih banyak kekurangannya, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan. Kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penyusunan ini.

Surakarta, 18 Juli 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	5
C. Manfaat Penelitian	5
D. Sasaran	6
E. Ruang Lingkup Kegiatan	6
F. Keluaran Kegiatan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Daya Saing Daerah	7
B. Indikator Utama dan Prinsip Daya Saing Daerah	12
C. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta	16
D. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Desain Penelitian	35
B. Populasi dan Sampel	35
C. Alat Analisis.....	35
D. Metode dan Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan.....	36
E. Kebutuhan Data Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta	36
BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA	49
A. Kondisi Administrasi Daerah	49
B. Kondisi Geografis	51
C. Kondisi Rencana Struktur Ruang.....	52

D.	Kondisi Pertumbuhan UMKM di Kota Surakarta	53
E.	Kondisi Perekonomian Daerah	55
F.	Kependudukan	53
G.	Isu Strategis RPJMD Kota Surakarta 2021-2026	55
BAB V	ANALISIS DAYA SAING DAERAH KOTA SURAKARTA.....	69
A.	Identitas Peluang/Kendala & Inventarisasi Urgensi	69
B.	Indeks Daya Saing Kota Surakarta 2021	75
BAB VI	PENUTUP.....	96
A.	Kesimpulan.....	96
B.	Rekomendasi	97
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kebutuhan Data Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta Tahun 2021.....	37
Tabel 4.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta	50
Tabel 4.2	Kondisi Topografi Kota Surakarta.....	51
Tabel 4.3	Pembagian Sistem Pusat Pelayanan Kota Surakarta Tahun 2011-2031	52
Tabel 4.4	Pertumbuhan UMKM di Kota Surakarta	53
Tabel 4.5	Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surakarta	54
Tabel 4.6	PDRB Kota Surakarta atas Dasar Harga Berlaku	57
Tabel 4.7	PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta Tahun 2016-2020.....	59
Tabel 4.8	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta Tahun 2016-2020	61
Tabel 4.9	Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta Tahun 2016-2020	62
Tabel 4.10	Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2016 – 2020	64
Tabel 4.11	Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan tahun 2020..	64
Tabel 4.12	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Gender Tahun 2020.....	65
Tabel 5.1	PDRB Kota Surakarta atas Dasar Harga Berlaku	68
Tabel 5.2	Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Surakarta 2018-2020.....	72
Tabel 5.3	Rasio Ekspor terhadap PMTB Kota Surakarta.....	73
Tabel 5.4	Rasio PDRB terhadap Impor Kota Surakarta.....	74

Tabel 5.5	Keseimbangan Penyediaan & Permintaan Kota Surakarta	74
Tabel 5.6	Sebaran Level Daya Saing Kota Surakarta 2020-2021	76
Tabel 5.7	Perkembangan IDSD 2020-2021	76
Tabel 5.8	Perkembangan IDSD 2020-2021	77
Tabel 5.9	IDSD Kota Surakarta Berdasarkan Aspek 2018-2021	87
Tabel 5.10	IDSD Kota Surakarta Berdasarkan Pilar 2018-2021	90
Tabel 5.11	IDSD Kota Surakarta Berdasarkan Dimensi 2018-2021	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Nilai IDSD Kota Surakarta Berdasarkan Pilar Tahun 2018-2020.....	3
Gambar 4.1	Peta Kota Surakarta	49
Gambar 4.2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2015 Sampai dengan 2020	55
Gambar 5.1	Diagram Aspek IDSD Kota Surakarta 2018-2021	89
Gambar 5.2	Diagram Skor Pilar IDSD Kota Surakarta 2018-2021	91
Gambar 5.3	Diagram Skor Dimensi IDSD Kota Surakarta 2018-2021	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menunjang pembangunan daerah berkelanjutan yang semakin dinamis diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara terarah dan terpadu. Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjelaskan posisi relatif suatu daerah terhadap daerah lainnya dengan memperhatikan semua faktor-faktor pembentuk daya saing yang dimilikinya serta seberapa jauh daerah tersebut dapat merealisasikan potensi dari faktor-faktor tersebut. Indeks Daya Saing Daerah merupakan gambaran tingkat produktivitas, perkembangan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah. Daya saing tidak hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja, tetapi daya saing tersebut diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup rakyat yang nyata dan berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat di suatu daerah.

Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, dapat dimaknai bahwa daya saing daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor input, output dan outcome yang ada di daerah masing-masing, dengan faktor input sebagai faktor utama pembentuk daya saing daerah yaitu kemampuan daerah, yang selanjutnya akan menentukan kinerja output yang merupakan inti dari kinerja perekonomian. Inti dari kinerja perekonomian adalah upaya meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang berada di dalam perekonomian tersebut. Ukuran kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas, indikatornya dapat berupa produktivitas tenaga kerja, PDRB per kapita atau tingkat kesempatan kerja

Daya saing sebuah kota atau negara sebenarnya sama dengan daya saing sebuah perusahaan atau organisasi. Kebutuhan membangun daya saing terkait dengan keberlanjutan sebuah organisasi. Porter (2010) menyampaikan

bahwa sebuah wilayah memerlukan daya saing sebagai sarana untuk berkembang baik dari sisi ekonomi, bisnis maupun kelangsungan wilayah itu sendiri. Beberapa pondasi dasar antar lain sumber daya manusia, infrastruktur, penguasaan teknologi, kelembagaan dan penelitian pengembangan. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bisa tercapai. Sumber dari inovasi dan kreatifitas yang menjadi pendorong pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia berkualitas. Kualitas sumber daya manusia ini yang akan menjadi pengungkit kebangkitan ekonomi pasca penularan *Covid 19*.

Kemampuan untuk meningkatkan daya saing suatu daerah tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam mengenali potensi dan menentukan factor-faktor pendorong daya saing. Kemampuan suatu wilayah dalam menetapkan kebijakan ekonomi yang difokuskan untuk dapat mendorong transformasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi regional turut menjadi penentu daya saing. Lebih lanjut, transformasi dan akselerasi pembangunan haruslah bertumpu pada peningkatan kapasitas SDM, peningkatan produktivitas, penguatan kapasitas IPTEK, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata, serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan akhir meningkatkan daya saing daerah yang pada gilirannya daya saing nasional (bangsa) juga turut meningkat.

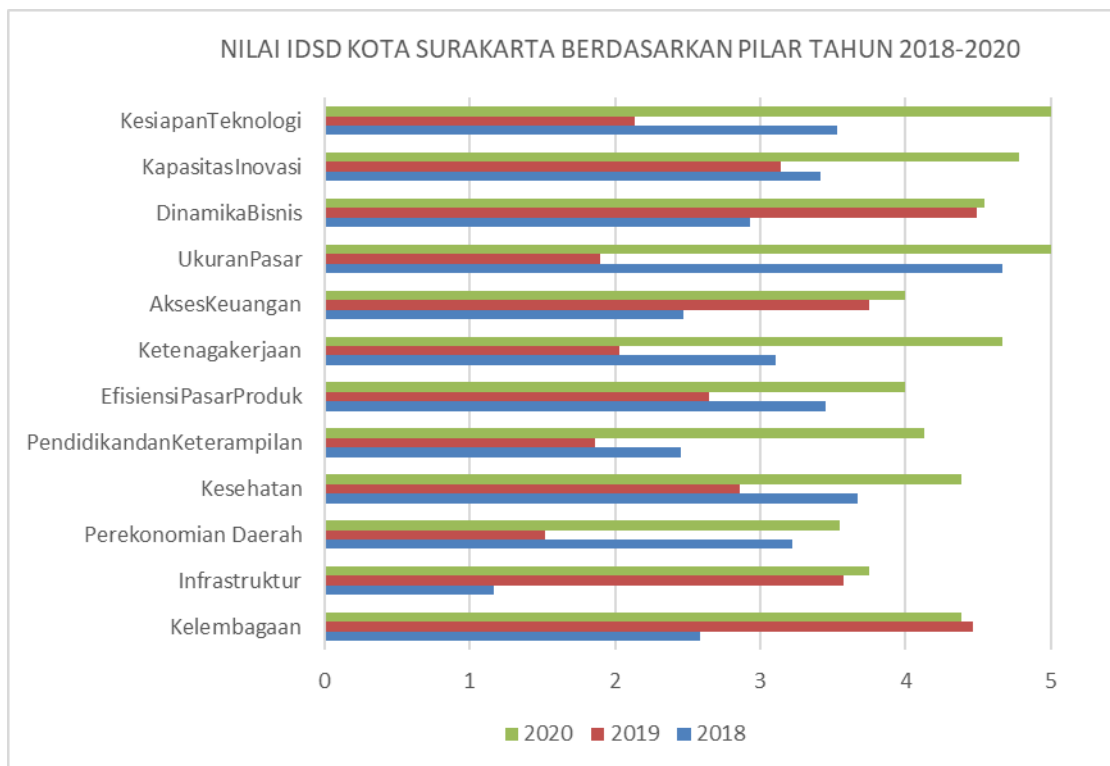
Kota Surakarta merupakan salah satu simpul penting pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah. Aktivitas ekonomi di kota ini yang didominasi oleh sektor perdagangan menjadi bagian penting dari mata rantai bisnis di kawasan Soloraya secara khusus, maupun Jawa Tengah secara umum. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta berfluktuatif meskipun tidak ekstrem. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kota ini mencapai 5,78 persen, dan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kota ini mengalami penurunan 4,01 persen. Hal ini disebabkan adanya pandemic COVID 19 yang berdampak pada masalah Kesehatan, Sosial dan Ekonomi di semua lapisan masyarakat daerah.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta tahun 2020 didominasi oleh sektor industri informasi dan komunikasi mencapai 19,70 persen, diikuti sektor industri jasa Kesehatan dan kegiatan sosial 12,11 persen. Berdasarkan data ini, maka kita bisa melihat bahwa pandemic covid

19 membawa dampak perubahan pada sector ekonomi di Kota Surakarta jika dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta tahun 2019 yang didominasi oleh sektor konstruksi, diikuti dengan sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Hingga awal 2021 perekonomian kota Surakarta belum sepenuhnya pulih karena dampak pandemic *Covid 19*, meskipun demikian daya saing kota Surakarta pada tahun 2020 berdasarkan empat aspek mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 dan tidak ada aspek utama yang mengalami penurunan pada tahun 2020.

Berdasarkan pilar yang dikonversikan pada panduan Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020, skor yang mencapai nilai maksimal adalah pilar Kesiapan teknologi, Ukuran Pasar, dan Kapasitas Inovasi, sedangkan skor yang masih dibawah 4 adalah pilar infrastruktur dan Perekonomian daerah.

Gambar 1.1 Nilai IDSD Kota Surakarta Berdasarkan Pilar Tahun 2018-2020



Sumber : Data Diolah 2020

Dari hasil penilaian indeks daya saing tahun 2020 menunjukkan bahwa penopang utama ekosistem inovasi kota Surakarta adalah Pilar Kelembagaan. Kota Surakarta memiliki kesiapan yang baik dalam hal kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tingkat Penyelesaian Ketertiban, Keamanan dan keindahan, serta indeks Reformasi Birokrasi serta ditunjang oleh infrastruktur yang diindikasikan melalui rasio Panjang jalan dan elektrifikasi yang baik dan jumlah nilai investasi Berskala Nasional dilihat dari investasi PMDN. Dari aspek Sumber daya manusia kota Surakarta dikuatkan oleh pilar Kesehatan dengan tingginya rasio dokter dan tenaga medis, serta rendahnya Angka Prosentasi Gizi buruk, stunting dan kematian bayi. Aspek pasar di dukung oleh kapasitas tenaga kerja dan ukuran pasar kota Surakarta sudah berada dalam kategori unggul, diindikasikan oleh Pola Kemitraan yang baik antar Industri kecil, menengah, besar dan Lembaga-lembaga usaha ataupun keuangan.

Berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki Kota Surakarta, maka ada beberapa aspek daya saing Kota Surakarta yang perlu dibangun, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, penguasaan teknologi, kelembagaan dan jaringan bisnis dan peningkatan perekonomian daerah. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bisa tercapai. Sumber dari inovasi dan kreatifitas yang menjadi pendorong pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia berkualitas. Berdasarkan hal tersebut tahun 2021 Kota Surakarta memiliki peluang serta potensi untuk meningkatkan daya saing daerah mengingat Kota Surakarta memiliki peran penting sebagai pusat perdagangan di wilayah kawasan soloraya.

Mengacu pada system penilaian *Global Competitiveness Index* oleh *World Economic Forum*, *The World Competitiveness Yearbook* oleh *Institute for Management Development*, *European Competitiveness Index* oleh *European Commision* tentang Daya Saing Daerah dan strategi Pembangunan oleh *Asia Competitiveness Institute*, dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah di Indonesia, maka penilaian IDSD tahun 2021 ditetapkan 4 aspek yang diklasifikasikan menjadi 12 pilar. Keempat aspek pokok yang dijadikan acuan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah meliputi:

1. Aspek Ekosistem Inovasi: Pilar Dinamika Bisnis, Pilar Kapasitas Inovasi, dan Pilar Kesiapan Teknologi.
2. Aspek Penguat/*Enabling Environment*: Pilar Kelembagaan, Pilar Infrastruktur, dan Pilar Perekonomian Daerah
3. Aspek Sumber Daya Manusia/*Human Capital*: Pilar Kesehatan dan Pilar Pendidikan & Keterampilan
4. Aspek Pasar/*Market*: Pilar Efisiensi Pasar Produk, Pilar Ketenagakerjaan, Pilar Akses Keuangan, dan Pilar Ukuran Pasar

Kajian ini merupakan sebuah riset dengan desain kuantitatif dengan metode dokumentasi dan survey. Metode dokumentasi menggunakan data-data berupa dokumen regulasi dan kebijakan dari berbagai Perangkat Daerah dan metode survey dilakukan untuk mendapatkan beberapa data primer terkait dengan pilar ukuran pasar, kesiapan teknologi, dinamika bisnis dan kapasitas inovasi. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan metode statistic deskriptif untuk menghitung nilai dan skor indeks daya saing Kota Surakarta. Penentuan prioritas rekomendasi menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Kajian Indeks Daya Saing Daerah ini yaitu untuk Menyusun Dokumen Kajian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Surakarta Tahun 2021 yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta.

C. Manfaat Penelitian

Kajian ini memberikan manfaat yaitu:

1. Dasar penyusunan indeks daya saing Kota Surakarta tahun 2021.
2. Menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan hasil analisis indeks daya saing Kota Surakarta tahun 2021.
3. Menjadi dasar analisis perkembangan trend daya saing Kota Surakarta tahun 2021

D. Sasaran

Adapun sasaran dari kajian ini adalah

1. Memberikan masukan, saran dan rekomendasi bagi peningkatan daya saing daerah Kota Surakarta
2. Pengukuran indeks daya saing daerah Kota Surakarta tahun 2021
3. Membandingkan indeks daya saing daerah Kota Surakarta tahun 2020 dan 2021

E. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) meliputi:

1. Mengidentifikasi dan memetakan permasalahan Indeks Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2021.
2. Menganalisis trend Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta dari Tahun 2018 hingga 2021.
3. Menyusun proyeksi Indeks Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2022.
4. Menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan hasil analisis Indeks Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2021.
5. Menyusun rekomendasi recovery pemulihan ekonomi dan rekayasa sosial masyarakat Kota Surakarta di masa pandemi *Covid 19*.

F. Keluaran Kegiatan

Keluaran yang diharapkan dari hasil pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Indeks Daya Saing Daerah adalah:

1. Dokumen laporan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Surakarta Tahun 2021.
2. Dokumen kajian proyeksi Indeks Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2022.
3. Rekomendasi kebijakan terkait daya saing Kota Surakarta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Daya Saing Daerah

Sebuah negara atau sebuah region (Kabupaten/Provinsi) disebut kompetitif jika mengembangkan perusahaan beroperasi untuk berkompetisi dengan penuh keberhasilan dalam perekonomian global dan pada sisi lain mendukung peningkatan upah dan standar kehidupan pada penduduk secara umum. Daya saing tergantung pada produktivitas jangka panjang dimana bangsa atau region memberdayakan sumber daya manusia, modal dan sumber daya alamnya. Produktivitas diukur dari peningkatan upah berkesinambungan (*sustainable wages*), pertumbuhan kesempatan kerja (*job growth*), dan standar hidup (*standar of living*). Daya saing mengandung makna seberapa produktifnya industri sebuah region berkompetisi dalam industri sejenis. Region berkompetisi dalam hal menawarkan sebuah lingkungan yang lebih produktif untuk dunia usaha.

Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasi dengan masalah produktifitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktifitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (Porter, 1990 dalam Abdullah, 2002).

Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing dilihat dari beberapa indikator yaitu keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif, ada juga keunggulan absolut. Menurut Tarigan (2005:75). Keunggulan komperatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Lebih lanjut menurut tarigan (2005:75) istilah *comparative advantage* (keunggulan komparatif) mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo (1917). Dalam teori tersebut, Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan

yang komperatif maka kedua negara tersebut akan beruntung. Ternyata ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting di perhatikan dalam ekonomi regional.

Keunggulan kompetitif adalah suatu keunggulan yang dapat diciptakan dan dikembangkan. Ini merupakan ukuran daya saing suatu aktifitas kemampuan suatu negara atau suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah atau luar negeri. Maka dari itu, menurut Tarigan (2005:75) seorang perencana wilayah harus memiliki kemampuan untuk menganalisa potensi ekonomi wilayahnya. Dalam hal ini kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor ini memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang. Pengertian daya saing mulai berkembang setelah Porter (1990) mendefenisikan daya saing nasional: "luaran dari kemampuan suatu Negara untuk berinovasi dalam rangka mencapai, atau mempertahankan posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan Negara lain dalam sejumlah sector-sektor kuncinya. Secara eksplisit, Porter (1990) menyatakan bahwa konsep daya saing yang diterapkan pada level nasional tak lain adalah "produktivitas" yang didefenisikannya sebagai nilai output yang dihasilkan oleh tenaga kerja.

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI (PPSK BI) menggunakan definisi "daya saing daerah dalam penelitiannya sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan Internasional". Daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah yang dikembangkan dalam penelitian tersebut didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu: perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah dari penelitian-penelitian terdahulu.

World Economic Forum (WEF) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang

tinggi dan berkelanjutan. *Institute for Management Development* (IMD) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, *globality* dan *proximity*, serta model ekonomi dan sosial. *European Commission* mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, diiringi dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan (*regions*) untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi sementara terekspos pada daya saing eksternal. Konsep daya saing daerah berkembang dari konsep daya saing yang digunakan untuk perusahaan dan negara. Selanjutnya konsep tersebut dikembangkan untuk tingkat negara sebagai daya saing global, khususnya melalui lembaga *World Economic Forum* (*Global Competitiveness Report*) dan *International Institute for Management Development* (*World Competitiveness Yearbook*). Daya saing ekonomi suatu negara seringkali merupakan cerminan dari daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan. Disamping itu, dengan adanya tren desentralisasi, maka makin kuat kebutuhan untuk mengetahui daya saing pada tingkat daerah (PPSK BI, 2008).

Daya saing daerah menurut definisi yang dibuat Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) adalah "kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional." Sementara itu *Centre for Urban and Regional Studies* (CURDS), Inggris mendefinisikan daya saing daerah sebagai "kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya." *The European Commission* mendefinisikan daya saing sebagai "kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, diiringi dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan (*regions*) untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi sementara terekspos pada daya saing eksternal" (European Commission, 1999 p.4. dalam Garnier, Martin dan Tyler, 2004).

Sementara Huggins (2007) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan dari perekonomian untuk menarik dan mempertahankan perusahaan-perusahaan dengan kondisi yang stabil atau dengan pangsa pasar yang meningkat dalam aktivitasnya, dengan tetap mempertahankan atau meningkatkan standar kehidupan bagi semua yang terlibat didalamnya.” Dalam pengertian daya saing ini, secara tersirat dinyatakan pula bahwa kondisi perekonomian yang kondusif merupakan suatu syarat mutlak untuk meningkatkan daya saing daerah. Martin dan Tyler (2003) menyebutkan argumen mengapa daerah maupun negara saling berkompetisi:

- a) Untuk investasi, melalui kemampuan daerah untuk menarik masuknya modal asing, swasta, dan modal publik;
- b) Untuk tenaga kerja, dengan kemampuan untuk menarik masuknya tenaga kerja yang terampil, entrepreneur-entrepreneur dan tenaga kerja yang kreatif, dengan cara menyediakan lingkungan yang kondusif dan pasar tenaga kerja domestik.
- c) Untuk teknologi, melalui kemampuan daerah untuk menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, terdapat kesamaan esensi yang cukup jelas antara daya saing daerah dan daya saing nasional. Dapat diambil satu kesimpulan bahwa dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan suatu perekonomian daripada kemampuan sektor swasta atau perusahaan.
- b) Pelaku ekonomi (economic agent) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya berpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing. Tujuan dan hasil akhir meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain

adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas yang pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.

- c) Kata kunci dari konsep daya saing adalah "kompetisi." Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Kata "daya saing" menjadi kehilangan maknanya pada perekonomian yang tertutup mempertimbangkan hal-hal diatas, akhirnya PPSK-BI mendefenisikan daya saing daerah sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional (Abdullah dkk, 2002).

Meyer-Stamer (2008) menyatakan bahwa secara sistemik daya saing suatu Daerah adalah kemampuan sebuah Daerah untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di Daerah tersebut. Berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya yang fokus pada konsep produktivitas, pandangan Meyer didasarkan sepenuhnya pada manfaat yang diperoleh oleh masyarakat yang tinggal di suatu Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya hubungan yang erat antara daya saing dan kesejahteraan. Hal tersebut berarti bahwa Daerah yang kompetitif tidak hanya terkait dengan output yang dihasilkan seperti halnya produktivitas, melainkan berhubungan juga dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (Bristow, 2005).

Delgado et al. (2012) mendefinisikan daya saing sebagai tingkat output yang diharapkan per penduduk usia kerja dengan didukung oleh keseluruhan potensi sumber daya yang dimiliki suatu bangsa. Menurut Delgado, faktor-faktor yang menjadi pendorong daya saing adalah: infrastruktur sosial (kesehatan dan pendidikan) dan institusi politik (kualitas institusi politik dan aturan hukum); kebijakan moneter dan fiskal; dan lingkungan ekonomi mikro. Selain itu, daya tarik investasi juga memengaruhi daya saing suatu negara.

B. Indikator Utama dan Prinsip Daya Saing Daerah

Banyak faktor yang penentu mendorong produktivitas dan daya saing, memahami faktor dibalik proses ini telah menduduki pikiran ekonom selama ratusan tahun, melahirkan teori-teori mulai dari Adam Smith yang fokus pada spesialisasi dan pembagian kerja, penekanan ekonom neo-klasik pada investasi dalam modal fisik dan infrastruktur, dan yang baru tertarik pada pendidikan, pelatihan, kemajuan teknologi, stabilitas ekonomi makro, tata pemerintahan yang baik, kecanggihan perusahaan, efisiensi pasar dan lain-lain (GCI, 2014). Sementara semua faktor-faktor diatas mungkin penting, dari berbagai literatur, teori ekonomi, serta berbagai diskusi, indikator-indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah adalah (1) Perekonomian daerah, (2) Keterbukaan, (3) Sistem keuangan, (4) Infrastuktur dan sumber daya alam, (5) Ilmu pengetahuan dan teknologi, (6) Sumber daya manusia, (7) Kelembagaan, (8) Governance dan kebijakan pemerintah, (9) Manajemen dan ekonomi mikro (Abdullah dkk, 2002). Masing- masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perekonomian Daerah

Perekonomian daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Indikator kinerja ekonomi makro mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip berikut:

- a. Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya dalam jangka pendek.
- b. Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing jangka panjang.
- c. Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi di masa lalu.
- d. Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik.

2. Keterbukaan

Keterbukaan merupakan ukuran seberapa jauh perekonomian suatu daerah berhubungan dengan daerah lain yang tercermin dari perdagangan daerah tersebut dengan daerah lain dalam cakupan nasional. Indikator ini menentukan daya saing melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keberhasilan suatu daerah dalam perdagangan internasional merefleksikan daya saing perekonomian daerah tersebut.
- b. Keterbukaan suatu daerah baik dalam perdagangan domestik maupun internasional meningkatkan kinerja perekonomiannya.
- c. Investasi internasional mengalokasikan sumber daya secara efisien ke seluruh penjuru dunia.
- d. Daya saing yang didorong oleh ekspor terkait dengan orientasi pertumbuhan perekonomian daerah.
- e. Mempertahankan standar hidup yang tinggi mengharuskan integrasi dengan ekonomi internasional

3. Sistem Keuangan

Sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk fasilitasi aktivitas perekonomian yang memberikan nilai tambah. Sistem keuangan suatu daerah akan mempengaruhi alokasi faktor produksi yang terjadi di perekonomian daerah tersebut. Indikator sistem keuangan ini mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Sistem keuangan yang baik mutlak diperlukan dalam memfasilitasi aktivitas perekonomian daerah.
- b. Sektor keuangan yang efisien dan terintegrasi secara internasional mendukung daya saing daerah.

4. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Dalam hal ini infrastruktur merupakan indikator seberapa besar daya seperti modal fisik, geografis, dan sumber daya alam dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah. Indikator ini mendukung daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Modal fisik berupa infrastruktur baik ketersediaan maupun kualitasnya mendukung aktivitas ekonomi daerah.
- b. Modal alamiah baik berupa kondisi geografis maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga mendorong aktivitas perekonomian daerah.
- c. Teknologi informasi yang maju merupakan infrastruktur yang mendukung berjalannya aktivitas bisnis di daerah yang berdaya saing.

5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengukur kemampuan daerah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah. Indikator ini mempengaruhi daya saing daerah melalui beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Keunggulan kompetitif dapat dibangun melalui aplikasi teknologi yang sudah ada secara efisien dan inovatif.
- b. Investasi pada penelitian dasar dan aktivitas yang inovatif yang menciptakan pengetahuan baru sangat krusial bagi daerah ketika melalui tahapan pembangunan ekonomi yang lebih maju.
- c. Investasi jangka panjang berupa R&D akan meningkatkan daya saing sektor bisnis.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam hal ini ditujukan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. Faktor SDM ini mempengaruhi daya saing daerah berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Angkatan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu daerah.
- b. Pelatihan dan pendidikan adalah cara yang paling baik dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas.
- c. Sikap dan nilai yang dianut oleh tenaga kerja juga menentukan daya saing suatu daerah.
- d. Kualitas hidup masyarakat suatu daerah menentukan daya saing daerah tersebut begitu juga sebaliknya.

7. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan indikator yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, hukum dan aspek keamanan mampu mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian di daerah. Pengaruh faktor kelembagaan terhadap daya saing daerah didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut.

- a. Stabilitas sosial dan politik melalui sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik merupakan iklim yang kondusif dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah yang berdaya saing.
- b. Peningkatan daya saing ekonomi suatu daerah tidak akan dapat tercapai tanpa adanya sistem hukum yang baik serta penegakan hukum yang independen.
- c. Aktivitas perekonomian daerah suatu daerah tidak akan dapat berjalan secara optimal tanpa didukung oleh situasi keamanan yang kondusif.

8. Governance dan Kebijakan Pemerintah

Governance dan kebijakan pemerintah dimaksudkan sebagai ukuran dari kualitas administrasi pemerintah daerah, khususnya dalam rangka menyediakan infrastruktur fisik dan peraturan-peraturan daerah. Secara umum pengaruh faktor governance dan kebijakan pemerintah bagi daya saing daerah dapat disarikan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Dengan tujuan menciptakan iklim persaingan yang sehat intervensi pemerintah dalam perekonomian sebaiknya diminimalkan.
- b. Pemerintah berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang terprediksi serta berperan pula dalam meminimalkan resiko bisnis.
- c. Efektivitas administrasi pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan aturan-aturan berpengaruh terhadap daya saing suatu daerah.
- d. Efektivitas pemerintah dalam melakukan koordinasi dan menyediakan informasi tertentu pada sektor swasta mendukung daya saing ekonomi suatu daerah.
- e. Fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi merupakan faktor yang kondusif dalam mendukung.

9. Manajemen dan Ekonomi Mikro

Dalam indikator manajemen dan ekonomi mikro pengukuran yang dilakukan dikaitkan dengan pertanyaan seberapa jauh perusahaan di daerah dikelola dengan cara yang inovatif, menguntungkan dan bertanggung jawab. Adapun prinsip yang relevan terhadap daya saing daerah di antaranya adalah:

- a. Rasio harga/kualitas yang kompetitif dari suatu produk mencerminkan kemampuan managerial perusahaan-perusahaan yang berada di suatu daerah.
- b. Orientasi jangka panjang manajemen perusahaan akan meningkatkan daya saing daerah di mana perusahaan tersebut berada.
- c. Efisiensi dalam aktivitas perekonomian ditambah dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam keharusan bagi perusahaan yang kompetitif.
- d. Kewirausahaan sangat krusial bagi aktivitas ekonomi pada masa-masa awal.
- e. Dalam usaha yang sudah mapan, manajemen perusahaan memerlukan keahlian dalam mengintegrasikan serta membedakan kegiatan-kegiatan usaha.

C. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta 2005-2025, dan secara spesifik dalam jangka yang lebih singkat lagi terutama untuk menghadapi dampak pandemi global Covid-19 yang luas, perlu diselaraskan

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Fokus prioritas makro RPJMD Kota Surakarta 2021–2026 adalah:

1. Tata kelola pemerintahan yang responsif, cerdas, akuntabel, dan inovatif mengembangkan kearifan budaya lokal
2. Masyarakat sehat dan tangguh
3. Sumber daya masyarakat yang kreatif dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal yang luhur dalam konteks masa kini
4. Kemajuan ekonomi yang cerdas, berkeadilan dan berkelanjutan infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh
5. Ketahanan sosial yang tangguh dan kesejahteraan sosial yang adil merata

Fokus prioritas makro tersebut diintegrasikan dalam perincian tema dan arah kebijakan sebagai berikut.

1. Arah Kebijakan Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta lima tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 ditujukan untuk **“Penguatan Perekonomian Daerah Melalui Sektor pariwisata yang terintegrasi dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Pemenuhan layanan kesehatan dan Pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19;
- b. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan melanjutkan jaminan sosial;
- c. Pemasaran pariwisata dengan fokus: wisata sejarah, kota MICE, Wiskulja (Wisata Kuliner dan belanja), seni budaya, olahraga, kesehatan dan ekonomi digital berbasis konsep *Eco Cultural City*;
- d. Pembinaan kompetensi dan kualitas pemuda, perempuan, dan kelompok rentan untuk produktif, adaptif, dan kompetitif;
- e. Penataan organisasi tata kerja dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah menyesuaikan perubahan regulasi yang berlaku dan perkembangan normal baru;

- f. Inisiasi Kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
- 1) Pemasaran kota melalui event budaya dan olahraga
 - 2) Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal
 - 3) Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha
 - 4) Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional
 - 5) Pengentasan Kemiskinan
 - 6) Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya.
 - 7) Pengembangan sistem pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jawa berbasis teknologi informasi menuju *smart education*; dan
 - 8) Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif berbasis teknologi informasi dan kearifan nilai budaya lokal mewujudkan kota cerdas (*smart city*).

2. Arah Kebijakan Tahun 2023

Dengan mendasarkan pada asumsi tahun 2022 berjalan normal, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk **“Pengembangan Kota Budaya yang Modern Didukung oleh Birokrasi yang Gesit dan Partisipasi Publik yang Kreatif dan inovatif”** dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional;
- b. Pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota berbasis TIK dan jaringan sosial komunitas;
- c. Pendampingan intensif *start up*, usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan mendukung sektor wisata kuliner, belanja, dan jasa (Wiskulja);

- d. Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - 1) Meningkatkan *length of stay* (LoS; lama tinggal) kunjungan ke Kota Surakarta melalui event budaya dan olahraga
 - 2) Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal
 - 3) Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha
 - 4) Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, perumahan
 - 6) Pengentasan Kemiskinan
 - 7) Mewujudkan *smart city*
 - 8) Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya.
- e. Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital mendukung Surakarta kota budaya modern;
- f. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring sumber daya;
- g. Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan *wellness tourism* dan *sport tourism*;
- h. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber kapasitas Fiskal; dan
- i. Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup: air, sanitasi, sampah, kesehatan lingkungan.

3. Arah Kebijakan Tahun 2024

Dengan mendasarkan pada asumsi tahun 2022 dan 2023 sudah ada penambahan investor; birokrasi sudah cakap memasarkan potensi kota (seni budaya, kekayaan budaya tak benda), *start up* pemuda sudah bertambah, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2024 ditujukan untuk **"Pengembangan Kota Budaya Modern yang Inklusif dan Ramah**

Lingkungan Berbasis Kolaborasi Lintas komponen” dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup: air, sanitasi, sampah, kesehatan lingkungan;
- b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional;
- c. Melanjutkan *smart governance*: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas;
- d. Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat, dan pemasaran *wellness tourism* dan *sport tourism*;
- e. Melanjutkan Kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - 1) Meningkatkan *LoS* kunjungan ke Kota Surakarta melalui event budaya dan olahraga
 - 2) Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal
 - 3) Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha
 - 4) Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, perumahan
 - 6) Pengentasan Kemiskinan
 - 7) Mewujudkan *smart city*
 - 8) Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya.
- f. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber kapasitas Fiskal;
- g. Penurunan kemiskinan dengan berbasis usaha mikro dan jaringan sosial; dan
- h. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada pendampingan usaha mikro.

4. Arah Kebijakan Tahun 2025

Dengan mendasarkan pada asumsi tahun 2023 dan 2024 proyek infrastruktur pendukung kota budaya modern sudah ada yang selesai; rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Surakarta sudah naik, *start up* pemuda sudah bertambah, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk **“Penguatan jejaring sosial untuk membangun masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih”** dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat, dan pemasaran *wellness tourism* dan *sport tourism*;
- b. Pelayanan Pendidikan berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat;
- c. Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan;
- d. Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - 1) Meningkatkan *LoS* kunjungan ke Kota Surakarta melalui event budaya dan olahraga
 - 2) Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal;
 - 3) Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha
 - 4) Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, perumahan
 - 6) Pengentasan Kemiskinan
 - 7) Mewujudkan *smart city*
 - 8) Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya.
- e. Ekspansi pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota;
- f. Penguatan orientasi ekspor pelaku Usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan;

- g. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045;
- h. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin; dan
- i. Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan publik berbasis digital, inklusif, dan mendukung Surakarta kota budaya modern.

5. Arah Kebijakan Tahun 2026

Dengan mendasarkan pada asumsi tahun 2024 dan 2025 proyek infrastruktur pendukung kota budaya modern sudah selesai; rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Surakarta sudah naik, *start up* pemuda sudah bertambah, gotong royong masyarakat bertambah banyak jenisnya, ekspor naik volumenya, kampung wisata sudah bertumbuh, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2026 ditujukan untuk **“Pemerataan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis komunitas untuk memantapkan kota budaya yang sejahtera”** dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045;
- b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional;
- c. Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat, dan pemasaran *wellness tourism* dan *sport tourism*;
- d. Pelayanan Pendidikan berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat;
- e. Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan;
- f. Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:

- 1) Meningkatkan *LoS* kunjungan ke Kota Surakarta melalui event budaya dan olahraga
 - 2) Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal
 - 3) Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha
 - 4) Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan perumahan
 - 6) Pengentasan kemiskinan
 - 7) Mewujudkan *smart city*
 - 8) Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya.
- g. Ekspansi pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota, melalui: Penguatan orientasi ekspor pelaku Usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan mewujudkan *smart economy*;
- h. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045;
- i. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin; dan
- Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan publik berbasis data digital, inklusif, dan mendukung Surakarta kota budaya modern.

D. PENGUKURAN INDEKS DAYA SAING DAERAH

Mengacu pada system penilaian *Global Competitiveness Index* oleh *World Economic Forum*, *The World Competitiveness Yearbook* oleh *Institute for Management Development*, *European Competitiveness Index* oleh *European Commission* tentang Daya Saing Daerah dan strategi Pembangunan oleh *Asia Competitiveness Institute*, dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah di Indonesia, maka penilaian IDSD tahun 2021 ditetapkan 4 aspek yang diklasifikasikan menjadi 12 pilar. Empat aspek Indeks Daya Saing Daerah antara lain aspek ekosistem inovasi, aspek penguat, aspek sumber daya dan

aspek pasar menurut Kemenristekbrin (2021). Keempat aspek ini diperinci menjadi 12 pilar , 23 dimensi dan 97 indikator pengukuran yang menyertainya. Keempat aspek pokok yang dijadikan acuan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah meliputi:

1. Aspek Ekosistem Inovasi: Pilar Dinamika Bisnis, Pilar Kapasitas Inovasi, dan Pilar Kesiapan Teknologi.
2. Aspek Penguat/*Enabling Environment*: Pilar Kelembagaan, Pilar Infrastruktur, dan Pilar Perekonomian Daerah
3. Aspek Sumber Daya Manusia/*Human Capital*: Pilar Kesehatan dan Pilar Pendidikan & Keterampilan
4. Aspek Pasar/*Market*: Pilar Efisiensi Pasar Produk, Pilar Ketenagakerjaan, Pilar Akses Keuangan, dan Pilar Ukuran Pasar

1. ASPEK EKOSISTEM INOVASI

1.1. Pilar dinamika bisnis

A. Dimensi Regulasi.

Regulasi dan Reformasi Birokrasi (kemudahan izin usaha dan investasi) yang memiliki dampak pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah terdiri dari beberapa pertanyaan berikut ini.

- 1) Regulasi apa saja yang dijadikan Pedoman dalam menentukan besaran biaya administrasi perijinan memulai bisnis/industri kecil, menengah dan besar?
- 2) Berapa Rata-rata durasi waktu pengurusan administrasi izin berusaha yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memulai bisnis/industri?
- 3) Berapa persentase peningkatan jumlah perizinan usaha dari tahun sebelumnya?
- 4) Berapa persentase usaha/industri yang memanfaatkan kebijakan/regulasi insentif pajak untuk proses bisnisnya dari total industri yang ada?

B. Dimensi Kewirausahaan.

Dimensi kewirausahaan untuk mengukur mengenai pertumbuhan industri kecil, menengah dan besar. Dampak dari dimensi kewirausahaan ini terlihat pada perubahan PAD, APBD, PDRB, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang perlu diidentifikasi pada dimensi kewirausahaan antara lain:

- 5) Bagaimana Presentase Pertumbuhan usaha/industri kecil dan menengah?
- 6) Bagaimana presentase pertumbuhan usaha/industri besar? (Untuk Tingkat Provinsi)
- 7) Bagaimana sistem manajemen produk hasil industri kecil dan menengah? (Bisa dalam bentuk SOP dan sertifikat ISO))
- 8) Bagaimana sistem manajemen produksi hasil industri besar? (dalam bentuk sertifikat ISO)
- 9) Berapa jumlah perusahaan sosial (social enterprise) yang sudah terdaftar oleh Pemerintah Daerah?
- 10) Berapa Jumlah perusahaan Startup yang terdaftar di inkubator bisnis perguruan tinggi/Balitbangda/inkubator bisnis swasta?

1.2. Pilar Kapasitas Inovasi

A. Dimensi Interaksi dan Keberagaman

Memaksimalkan potensi daerah (Sinergi ABG+C) untuk memberi dampak pada pembangunan ekonomi berbasis inovasi. Dimensi kewirausahaan pada pilar kapasitas inovasi terdiri dari beberapa pertanyaan yaitu:

- 11) Bagaimana implementasi Program sistem Inovasi Daerah?
- 12) Bagaimana keberadaan dan pengembangan klaster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagai bentuk interaksi dan kolaborasi antara Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang dan Masyarakat?
- 13) Berapa jumlah Kolaborasi antara perguruan tinggi, Lembaga dan atau litbang dengan pemerintah daerah dalam program

pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)

- 14) Berapa jumlah perjanjian kerja sama antara industri/dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir?
- 15) Berapa jumlah kolaborasi antara perguruan tinggi dan atau Lembaga litbang, industri/dunia usaha dan pemerintah daerah (triple helix) dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)
- 16) Berapa Skor/Nilai Indeks Inovasi Daerah tahun terakhir?

B. Dimensi Penelitian dan Pengembangan (R&D)

Membangun kapasitas inovasi daerah penciptaan budaya inovasi daerah berkelanjutan. Indikator dari dimensi penelitian dan pengembangan pada pilar kapasitas inovasi yaitu:

- 17) Berapa jumlah Jumlah artikel ilmiah jurnal yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan atau lembaga litbang setempat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi / internasional selama 2 tahun terakhir?
- 18) Berapa jumlah penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, design Industri, dll) secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?
- 19) Berapa Jumlah Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, design Industri, dll) di daerah yang sudah didaftarkan secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?
- 20) Bagaimana Jumlah paten yang telah dimanfaatkan di industri?
- 21) Berapa Persentase anggaran penelitian dan pengembangan terhadap total APBD?
- 22) Berapa persentase kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis produk unggulan daerah terhadap jumlah penelitian dari perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya?

- 23) Berapa persentase jumlah peneliti di perguruan tinggi dan perangkat daerah kelitbangan dibanding hasil penelitian yang dipublikasikan dalam 2 tahun terakhir?
- 24) Peringkat perguruan tinggi di daerah secara nasional? (Perguruan Tinggi yang berlokasi di daerah dan memiliki Peringkat/Ranking Tertinggi)
- 25) Berapa Jumlah dunia usaha dan Industri yang memiliki unit penelitian dan pengembangan?
- 26) Berapa Jumlah Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kelitbangan?

C. Dimensi Komersialisasi

Komersialisasi inovasi dari produk unggulan daerah. Dimensi ini terdiri dari 2 indikator yaitu:

- 27) Bagaimana jumlah Perguruan tinggi dan institusi kelitbangan di daerah yang telah melakukan komersialisasi inovasi?
- 28) Adakah dan Bagaimanakah kondisi Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Techno Park?

1.3. Pilar Kesiapan Teknologi

A. Dimensi Telematika

Kesiapan Infrastruktur digital dan informatika yang berdampak pada kapasitas SDM era Digital. Indikator dimensi ini adalah:

- 29) Berapa Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon/Smartphone?
- 30) Berapa Proporsi rumah tangga dengan akses internet?

B. Dimensi Teknologi

Tingkat Kesiapan Inovasi yang berdampak terhadap komersialisasi Inovasi. Indikator dimensi ini antara lain:

- 31) Berapa Produk Inovasi Teknologi yang sudah di Komersialisasikan?

1. ASPEK FAKTOR PENGUAT/ENABLING ENVIRONMENT

2.1. Pilar Kelembagaan

A. Dimensi Tata Kelola Pemerintah

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah yang baik {Good Governance} yaitu tingkat partisipasi masyarakat, penegakan supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder {pelayanan } dan konsensus {kesepakatan bersama}. Pencapaian indikator dimensi tata kelola pemerintah ini akan memberikan dampak pada tingkat kepercayaan masyarakat, tingkat kepercayaan investor, pertumbuhan ekonomi, peningkatan PAD, dan penciptaan lapangan kerja. Indikator dimensi tata kelola pemerintah pada pilar kelembagaan antara lain:

- 32) Apakah hasil penetapan tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional berdasarkan Kementerian Dalam Negeri?
- 33) Apakah hasil Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Kementerian PAN dan RB?
- 34) Apakah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?
- 35) Apakah hasil Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?
- 36) Berapa hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)?
- 37) Berapa capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi ?

B. Dimensi Keamanan dan Ketertiban

Penegakan supremasi hukum dalam mendukung Good Governance demi terciptanya situasi yang kondusif dalam mendukung program pembangunan daerah. Dimensi keamanan dan ketertiban terdiri dari beberapa indikator yaitu:

- 38) Bagaimana Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan?
- 39) Berapa Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)?

2.2. Pilar Infrastruktur

A. Dimensi Infrastruktur Transportasi

Mengukur kesiapan infrastruktur jalan di daerah dalam kondisi baik untuk dapat melihat keuntungan/kerugian baik secara materiil dan non materiil. Indikator dimensi ini terdiri dari:

- 40) Berapa rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor?
- 41) Berapa rasio panjang jalan kondisi baik dibanding total panjang jalan (tidak termasuk jalan tol)?

B. Dimensi Infrastruktur Air Bersih, RTH Dan Kelistrikan

Mengukur kebutuhan dasar masyarakat yaitu kebutuhan infrastruktur primer dan kesehatan masyarakat. Indikatornya yaitu:

- 42) Berapa persentase rumah tangga berakses air minum layak?
- 43) Berapa besar persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)?
- 44) Berapa rasio elektrifikasi?

2.3. Pilar Perekonomian Daerah

A. Dimensi Keuangan Daerah

Mengukur kemampuan keuangan daerah untuk melihat tingkat keberlanjutan pembangunan daerah. Dimensi ini terdiri dari beberapa indikator yaitu:

- 45) Berapa besar pertumbuhan ekonomi?
- 46) Berapa Indeks Kapasitas Fiskal daerah?
- 47) Berapa persentase penurunan/peningkatan nilai PAD terhadap total pendapatan daerah dari tahun sebelumnya?
- 48) Berapa Persentase peningkatan anggaran pemerintah daerah (APBD) terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun sebelumnya?

B. Dimensi Stabilitas Ekonomi

Mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada stabilitas Ekonomi, Sosial, Hukum dan Keamanan. Indikator dari dimensi ini yaitu:

- 49) Berapa Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) untuk tahun terakhir?
- 50) Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN Berdasarkan Data Terakhir?
- 51) Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA Berdasarkan Data Terakhir?
- 52) Berapa Persentase peningkatan/penurunan UMKM terhadap UKM dari tahun sebelumnya?
- 53) Berapa Persentase Angka Kemiskinan dari tahun terakhir?
- 54) Berapa persentase Nilai Tukar Petani (NTP)?
- 55) Berapa besarnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun terakhir?

3. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA/HUMAN CAPITAL

1.1. Pilar Kesehatan

A. Dimensi Kesehatan

Mengukur tingkat kesehatan masyarakat yang berdampak pada kesiapan sumber daya manusia. Indicator dimensi kesehatan ini adalah:

- 56) Berapa Persentase balita gizi buruk tahun terakhir?
- 57) Berapa Persentase Jumlah Balita Stunting tahun terakhir?
- 58) Berapa Angka Kematian Bayi/Balita (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun terakhir?
- 59) Berapa Persentase antara Jumlah Penduduk yang mengalami Keluhan Kesehatan dan terganggunya aktivitas (JPKK) dengan jumlah Penduduk pada tahun terakhir?
- 60) Berapa nilai angka harapan hidup tahun terakhir?
- 61) Berapa Rasio puskesmas per 100.000 (seratus ribu) penduduk pada tahun terakhir?
- 62) Berapa Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk pada tahun terakhir?
- 63) Rasio dokter dan medis terhadap per 100.000 (seratus ribu) penduduk tahun terakhir?

1.2. Pilar Pendidikan dan Keterampilan

A. Dimensi Pendidikan

Mengukur tingkat pendidikan formal yang berdampak pada kapasitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing. Indikator dari dimensi ini yaitu:

- 64) Berapa Angka Harapan Lama Sekolah?
- 65) Berapa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)?
- 66) Berapa Angka Partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi?
- 67) Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan Diploma I/II/III terhadap total jumlah penduduk?
- 68) Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan D4/S1 terhadap total jumlah penduduk?
- 69) Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S2 terhadap total jumlah penduduk?
- 70) Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S3 terhadap total jumlah penduduk?

B. Dimensi Keterampilan

Membangun kualitas SDM terampil untuk meningkatkan kapasitas SDM yang berdaya saing. Indikator dimensi keterampilan pada pilar ini yaitu:

- 71) Berapa persentase Angka Partisipasi Kasar siswa Sekolah Menengah kejuruan?
- 72) Berapa kenaikan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja pada tahun ini dan tahun sebelumnya?
- 73) Berapa jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)?
- 74) Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Literasi Digital Penduduk?

2. ASPEK PASAR/MARKET

2.1. Pilar Efisiensi Pasar Produk

A. Dimensi Kompetisi Dalam Negeri

Kondisi iklim usaha, persaingan dan investasi (pelaku pasar) yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Indicator dari dimensi ini yaitu:

- 75) Bagaimana pola dan karakteristik pola kemitraan diantara perusahaan (industri kecil, menengah dan besar)
- 76) Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Poktan/Gapoktan yang aktif?
- 77) Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha asosiasi pedagang pasar yang aktif?
- 78) Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang aktif?

B. Dimensi Pajak Dan Retribusi

Kontribusi pajak dan retribusi untuk PAD untuk melihat dampaknya terhadap keseimbangan keuangan Daerah. Dimensi ini memiliki beberapa indicator antara lain:

- 79) Berapa persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
- 80) Berapa Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

C. Dimensi Stabilitas Pasar

Stabilitas perekonomian Daerah untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap keseimbangan perekonomian Daerah. Dimensi stabilitas pasar terdiri dari dua indicator yaitu:

- 81) Apakah ada Regulasi pemerintah daerah yang mendorong efisiensi pasar dan menekan laju inflasi di daerah?
- 82) Bagaimana Tingkat ketimpangan ekonomi (Indeks Gini)?

2.2. Pilar Ketenagakerjaan

A. Dimensi Ketenagakerjaan

Dimensi ketenagakerjaan bisa dilihat dari kondisi angkatan kerja (jumlah pengangguran), kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja dan kesetaraan gender. Dimana dimensi ini berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, stabilitas perekonomian dan stabilitas keamanan ketertiban. Dimensi ini terdiri dari tiga indikator yaitu:

- 83) Berapa Presentase Penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK))?
- 84) Bagaimana Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)? (dalam persentase)
- 85) Berapa Indeks Pembangunan Gender (IPG)?

B. Dimensi Kapasitas Tenaga Kerja

Membangun kapasitas SDM yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, stabilitas perekonomian dan stabilitas keamanan ketertiban. Dimensi ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 86) Berapa Persentase jumlah tenaga kerja terdidik terhadap total angkatan kerja?
- 87) Berapa Persentase Pekerja Penuh Waktu (> 35 Jam) dalam Seminggu?
- 88) Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan tenaga kerja terampil?

1.3 Pilar Akses Keuangan

A. Dimensi Akses Keuangan

Kemudahan akses modal/keuangan yang berdampak pada tumbuhnya unit-unit usaha dan investasi. Indikator dari dimensi ini yaitu:

- 89) Berapa Persentase jumlah Bank di Daerah yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha?
- 90) Berapa Persentase jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha?
- 91) Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?

- 92) Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) (termasuk didalamnya modal ventura dan fund raising) kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?
- 93) Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada Petani dan/atau Nelayan?
- 94) Bagaimana ketersediaan modal ventura bagi struktur permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah?

1.4 Pilar Ukuran Pasar

A. Dimensi Ukuran Pasar

Dimensi dan luas Pasar yang berdampak peningkatan volume perdagangan ekspansi pasar. Indicator dimensi ukuran pasar yaitu:

- 95) Berapa Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas dibanding Jumlah Penduduk? (dalam presentase)
- 96) Bagaimana pertumbuhan nilai ekspor?
- 97) Berapa Nilai Neraca Perdagangan Antar Wilayah Provinsi (triliun rupiah)?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah dengan metode survei. Dalam penelitian survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Metode survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Desain penelitian survei yang dipergunakan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi ketenagakerjaan dan penerapan teknologi dalam praktek bisnis di Kota Surakarta.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah dinas dan lembaga, serta stakeholder yang relevan dengan pengukuran indeks daya saing daerah di Kota Surakarta. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*.

C. Alat Analisis

Kajian ini menggunakan alat analisis sebagai berikut:

1. Statistik deskriptif.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi Sugiono (2005:142).

2. Analisis Indeks Daya Saing Daerah

Mengukur tingkat daya saing daerah berdasarkan komponen daya saing daerah tahun 2021 diukur dengan 4 Aspek, 12 Pilar. Dari keempat aspek dan duabelas pilar indeks daya saing daerah tersebut didetailkan lagi menjadi 23 dimensi dan 97 indikator yang dapat diisi dengan data sesuai kondisi daerah masing-masing untuk kemudian dapat dihitung untuk menghasilkan angka indeks daya saing daerah. Semakin tinggi angka indeks daya saing

suatu daerah menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut mempunyai daya saing ekonomi yang semakin tinggi pula.

D. Metode dan Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Metode yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Pengisian Indikator IDSD secara online
Melakukan pengisian dan melengkapi (input/ubah) profil daerah/lembaganya masing-masing dengan format isian sesuai dengan sistem aplikasi IDSD
2. Verifikasi
Setelah masa pengisian selesai, dilakukan verifikasi atas seluruh jawaban oleh tim verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan dan menganalisis antara jawaban dengan data dukung yang dilampirkan serta dokumen-dokumen sumber lainnya
3. Perhitungan Nilai Indeks
Setelah proses input dan verifikasi selesai, perhitungan indeks akan dilakukan secara otomatis oleh system sebagai hasil adakan diperoleh skor indeks dari setiap komponen IDSD berdasarkan pilar, dimensi dan indicator serta total skor IDSD
4. Penyusunan Laporan
Tahapan ini merupakan proses analisis pemaknaan terhadap berbagai data dan informasi hasil Pengukuran IDSD, dalam rangka merumuskan masukan untuk strategi kebijakan dan perencanaan program/kegiatan
5. Penyerahan Laporan
Penyerahan Laporan IDSD diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang jelas dan valid bagi pemangku kepentingan dalam mengevaluasi, merumuskan dan mengintervensi kebijakan pembangunan daerah ke depan

E. Kebutuhan Data Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta

Dalam menunjang kegiatan penilaian indeks daya saing daerah kota Surakarta tahun 2021 berdasarkan indicator maka data sekunder yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kebutuhan Data Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta
Tahun 2021

No.	Indikator	Kebutuhan Data
1	Regulasi apa saja yang dijadikan Pedoman dalam menentukan besaran biaya administrasi perijinan memulai bisnis/industri kecil, menengah dan besar?	Regulasi yang Dijadikan Pedoman dalam Menentukan Besaran Biaya Administrasi Perijinan Industri
2	Berapa Rata-rata durasi waktu pengurusan administrasi izin berusaha yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memulai bisnis/industri?	Rata-Rata Durasi Waktu Pengurusan Administrasi Perijinan Usaha
3	Berapa persentase peningkatan jumlah perizinan usaha dari tahun sebelumnya?	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan Usaha dari Tahun Sebelumnya
4	Berapa persentase usaha/industri yang memanfaatkan kebijakan/regulasi insentif pajak untuk proses bisnisnya dari total industri yang ada?	Persentasi Industri yang Memanfaatkan Kebijakan Insentif Pajak
5	Bagaimana Presentase Pertumbuhan usaha/industri kecil dan menengah?	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri Kecil dan Menengah
6	Bagaimana presentase pertumbuhan usaha/industri besar? (Untuk Tingkat Provinsi)	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri Besar
7	Bagaimana sistem manajemen produk hasil industri kecil dan menengah? (Bisa dalam bentuk SOP dan sertifikat ISO)	Sistern Manajemen Produksi Hasil Industri Kecil dan Menengah (SOP, ISO,

No.	Indikator	Kebutuhan Data
		dll)
8	Bagaimana sistem manajemen produksi hasil industri besar? (dalam bentuk sertifikat ISO)	Sistem Manajemen Produksi Hasil Industri Besar (SOP, ISO, dll)
9	Berapa jumlah perusahaan sosial (social enterprise) yang sudah terdaftar oleh Pemerintah Daerah?	Jumlah Perusahaan Sosial yang Terdaftar oleh Pemerintah Daerah
10	Berapa Jumlah perusahaan Startup yang terdaftar di inkubator bisnis perguruan tinggi/Balitbangda/inkubator bisnis swasta?	Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi/ Startup yang terdaftar di Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi, Balitbangda dan Swasta
11	Bagaimana implementasi Program sistem Inovasi Daerah?	Implementasi Program Sistem Inovasi Daerah
12	Bagaimana keberadaan dan pengembangan klaster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagai bentuk interaksi dan kolaborasi antara Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang dan Masyarakat?	Keberadaan dan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah
13	Berapa jumlah Kolaborasi antara perguruan tinggi, Lembaga dan atau litbang dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)	Jumlah Kolaborasi Perguruan Tinggi, Lembaga dan Litbang dengan Pemerintah Daerah untuk Program Pengembangan Teknologi dan Inovasi

No.	Indikator	Kebutuhan Data
		dalam 2 Tahun Terakhir
14	Berapa jumlah perjanjian kerja sama antara industri/dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir?	Jumlah Perjanjian Kerjasama Antara Industri/ Dunia Usaha dengan Pemerintah Daerah untuk Program Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam 2 Tahun Terakhir
15	Berapa jumlah kolaborasi antara perguruan tinggi dan atau Lembaga litbang, industri/dunia usaha dan pemerintah daerah (triple helix) dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)	Jumlah Kolaborasi Perguruan Tinggi, Litbang. Industri dan Pemerintah Daerah (Triple-Helix) Bidang Teknologi dan Inovasi dalam 2 Tahun Terakhir
16	Berapa Skor/Nilai Indeks Inovasi Daerah tahun terakhir?	Hasil Indeks Inovasi Daerah Tahun Terakhir
17	Berapa jumlah Jumlah artikel ilmiah jurnal yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan atau lembaga litbang setempat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi / internasional selama 2 tahun terakhir?	Jumlah Artikel Ilmiah Jurnal yang Dihasilkan oleh Perguruan Tinggi yang Dipublikasikan dalam Jurnal Nasional Terakreditasi/ Internasional Selama 3 Tahun Terakhir
18	Berapa jumlah penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, design Industri, dll) secara	Jumlah penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual

No.	Indikator	Kebutuhan Data
	keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?	(paten, merek, cipta, dan design Industri) secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 3 tahun terakhir
19	Berapa Jumlah Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, design Industri, dll) di daerah yang sudah didaftarkan secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?	Jumlah Hak Cipta, Merek, Paten, dan Rahasia Dagang yang sudah Didaftarkan
20	Bagaimana Jumlah paten yang telah dimanfaatkan di industri?	Jumlah Paten yang Telah Dimanfaatkan Industri
21	Berapa Persentase anggaran penelitian dan pengembangan terhadap total APBD?	Persentase Anggaran Penelitian dan Pengembangan terhadap Total APBD
22	Berapa persentase kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis produk unggulan daerah terhadap jumlah penelitian dari perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya?	Persentase Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Berbasis Produk Unggulan Daerah terhadap Jumlah Penelitian
23	Berapa persentase jumlah peneliti di perguruan tinggi dan perangkat daerah kelitbang dibanding hasil penelitian yang dipublikasikan dalam 2 tahun terakhir?	Persentase Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Berbasis Produk Unggulan Daerah terhadap Jumlah Penelitian
24	Peringkat perguruan tinggi di daerah secara nasional? (Perguruan Tinggi yang berlokasi di daerah dan memiliki Peringkat/Ranking	Peringkat Perguruan Tinggi di Daerah Secara Nasional (Diambil yang Tertinggi)

No.	Indikator	Kebutuhan Data
	Tertinggi)	
25	Berapa Jumlah dunia usaha dan Industri yang memiliki unit penelitian dan pengembangan?	Jumlah Dunia Usaha dan Industri yang Memiliki Unit Penelitian dan Pengembangan
26	Berapa Jumlah Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kelitbangan?	Jumlah Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kelitbangan
27	Bagaimana jumlah Perguruan tinggi dan institusi kelitbangan di daerah yang telah melakukan komersialisasi inovasi?	Jumlah Perguruan Tinggi dan Institusi dan Kelitbangan di Daerah yang Telah Melakukan Komersialisasi Inovasi
28	Adakah dan Bagaimanakah kondisi Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Techno Park?	Kondisi Technopark dan Pusat Unggulan Iptek
29	Berapa Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon/Smartphone?	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/ Smartphone
30	Berapa Proporsi rumah tangga dengan akses internet?	Proporsi Rumahtangga dengan Akses Internet
31	Berapa Produk Inovasi Teknologi yang sudah di Komersialisasikan?	Jumlah Inovasi Teknologi di Daerah
32	Apakah hasil penetapan tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional berdasarkan Kementerian Dalam Negeri?	Hasil Penetapan Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional

No.	Indikator	Kebutuhan Data
33	Apakah hasil Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	Hasil Indeks Reformasi Birokrasi
34	Apakah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	Sistern Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
35	Apakah hasil hasil Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
36	Berapa hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)?	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Tingkat Provinsi
37	Berapa capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi?	Indeks Demokrasi Indonesia di Tingkat Provinsi
38	Bagaimana Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)?	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
39	Berapa Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)?	Persentase Penegakan Peraturan Daerah
40	Berapa rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor?	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan Bermotor
41	Berapa rasio panjang jalan kondisi baik dibanding total panjang jalan (tidak termasuk jalan tol)?	Rasio Panjang Jalan Kondisi Baik Dibanding Total Panjang Jalan
42	Berapa persentase rumah tangga berakses air minum layak?	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak
43	Berapa besar persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)?	Persentase Koefisien Ruang Terbuka Hiiiau (RTH)

No.	Indikator	Kebutuhan Data
44	Berapa rasio elektrifikasi?	Rasio Elektrifikasi
45	Berapa besar pertumbuhan ekonomi?	Pertumbuhan Ekonomi
46	Berapa Indeks Kapasitas Fiskal daerah?	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
47	Berapa persentase penurunan/peningkatan nilai PAD terhadap total pendapatan daerah dari tahun sebelumnya?	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun Sebelumnya
48	Berapa Persentase peningkatan anggaran pemerintah daerah (APBD) terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun sebelumnya?	Persentase Peningkatan APBD terhadap PDRB-ADHB dari Tahun Sebelumnya
49	Berapa Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) untuk tahun terakhir?	Nilai PDRB Per kapita ADHB
50	Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN Berdasarkan Data Terakhir?	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
51	Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA Berdasarkan Data Terakhir?	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional untuk Penanaman Modal Asing (PMA)
52	Berapa Persentase peningkatan/penurunan UMKM terhadap UKM dari tahun sebelumnya?	Persentase Peningkatan UMKM terhadap UKM
53	Berapa Persentase Angka Kemiskinan dari tahun terakhir?	Persentase Angka Kemiskinan

No.	Indikator	Kebutuhan Data
54	Berapa persentase Nilai Tukar Petani (NTP)?	Nilai Tukar Petani
55	Berapa besarnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun terakhir?	Indeks Ketahanan Pangan
56	Berapa Persentase balita gizi buruk tahun terakhir?	Persentase Balita Gizi Buruk
57	Berapa Persentase Jumlah Balita Stunting tahun terakhir?	Persentase Jumlah Balita Stunting
58	Berapa Angka Kematian Bayi/Balita (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun terakhir?	Angka Kematian Bayi/ Balita per 1000 Kelahiran Hidup
59	Berapa Persentase antara Jumlah Penduduk yang mengalami Keluhan Kesehatan dan terganggunya aktivitas (JPKK) dengan jumlah Penduduk pada tahun terakhir?	Persentase Angka Kesakitan/ Morbiditas
60	Berapa nilai angka harapan hidup tahun terakhir?	Angka Harapan Hidup Tahun Terakhir
61	Berapa Rasio puskesmas per 100.000 (seratus ribu) penduduk pada tahun terakhir?	Rasio Puskesmas Per 100.000 Penduduk
62	Berapa Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk pada tahun terakhir?	Persentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
63	Rasio dokter dan medis terhadap per 100.000 (seratus ribu) penduduk tahun terakhir?	Rasio Dokter dan Medis Per 100.000 Penduduk
64	Berapa Angka Harapan Lama Sekolah?	Angka Harapan Lama Sekolah
65	Berapa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)?	Rata-Rata Lama Sekolah

No.	Indikator	Kebutuhan Data
66	Berapa Angka Partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi?	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi
67	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan Diploma I/II/III terhadap total jumlah penduduk?	Persentase Jumlah Penduduk Berpendidikan Diploma I/ II/ III
68	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan D4/S1 terhadap total jumlah penduduk?	Persentase Jumlah Penduduk Berpendidikan D4/ S1
69	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S2 terhadap total jumlah penduduk?	Persentase Penduduk Berpendidikan S2
70	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S3 terhadap total jumlah penduduk?	Persentase Jumlah Penduduk Berpendidikan S3
71	Berapa persentase Angka Partisipasi Kasar siswa Sekolah Menengah kejuruan?	Angka Partisipasi Kasar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan
72	Berapa kenaikan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja pada tahun ini dan tahun sebelumnya?	Kenaikan Jumlah Program Latihan BLK 2 Tahun Terakhir
73	Berapa jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)?	Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
74	Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Literasi Digital Penduduk?	Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Literasi Digital Produk
75	Bagaimana pola dan karakteristik pola kemitraan diantara perusahaan (industri kecil,	Pola dan Karakteristik Kemitraan Antar

No.	Indikator	Kebutuhan Data
	menengah dan besar)	Perusahaan (Kecil, Menengah dan Besar)
76	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Poktan/Gapoktan yang aktif?	Persentase Kelembagaan Gapoktan yang Aktif
77	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha asosiasi pedagang pasar yang aktif?	Persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Asosiasi Pedagang Pasar yang Aktif
78	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang aktif?	Persentase Kelembagaan Pelaku UMKM yang Aktif
79	Berapa persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?	Rasio Rumah Sakit Umum per 100.000 Penduduk
80	Berapa Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)?	Kontribusi Retribusi Daerah dalam PAD
81	Apakah ada Regulasi pemerintah daerah yang mendorong efisiensi pasar dan menekan laju inflasi di daerah?	Regulasi Pemerintah Daerah yang Mendorong Efisiensi Pasar dan Menekan Laju Inflasi Daerah
82	Bagaimana Tingkat ketimpangan ekonomi (Indeks Gini)?	Tingkat Ketimpangan Ekonomi (Indeks Gini)
83	Berapa Presentase Penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)?	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
84	Bagaimana Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)? (dalam persentase)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
85	Berapa Indeks Pembangunan Gender (IPG)?	Indeks Pembangunan Gender

No.	Indikator	Kebutuhan Data
86	Berapa Persentase jumlah tenaga kerja terdidik terhadap total angkatan kerja?	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Terdidik Terhadap Total Angkatan Kerja
87	Berapa Persentase Pekerja Penuh Waktu (> 35 Jam) dalam Seminggu?	Persentase Pekerja Penuh Waktu dalam Seminggu
88	Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan tenaga kerja terampil?	Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Tenaga Kerja Terampil
89	Berapa Persentase jumlah Bank di Daerah yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha?	Jumlah Bank di Daerah yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha
90	Berapa Persentase jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha?	Persentase Jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha
91	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?	Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM
92	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) (termasuk didalamnya modal ventura dan fund raising) kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?	Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
93	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada Petani	Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Mikro Kepada Petani/

No.	Indikator	Kebutuhan Data
	dan/atau Nelayan?	Nelayan
94	Bagaimana ketersediaan modal ventura bagi struktur permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah?	Ketersediaan Modal Ventura Bagi Struktur Permodalan Koperasi dan UKM
95	Berapa Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas dibanding Jumlah Penduduk? (dalam presentase)	Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun ke Atas
96	Bagaimana pertumbuhan nilai ekspor?	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor
97	Berapa Nilai Neraca Perdagangan Antar Wilayah Provinsi (triliun rupiah)?	Persentase Nilai Neraca Volume Perdagangan

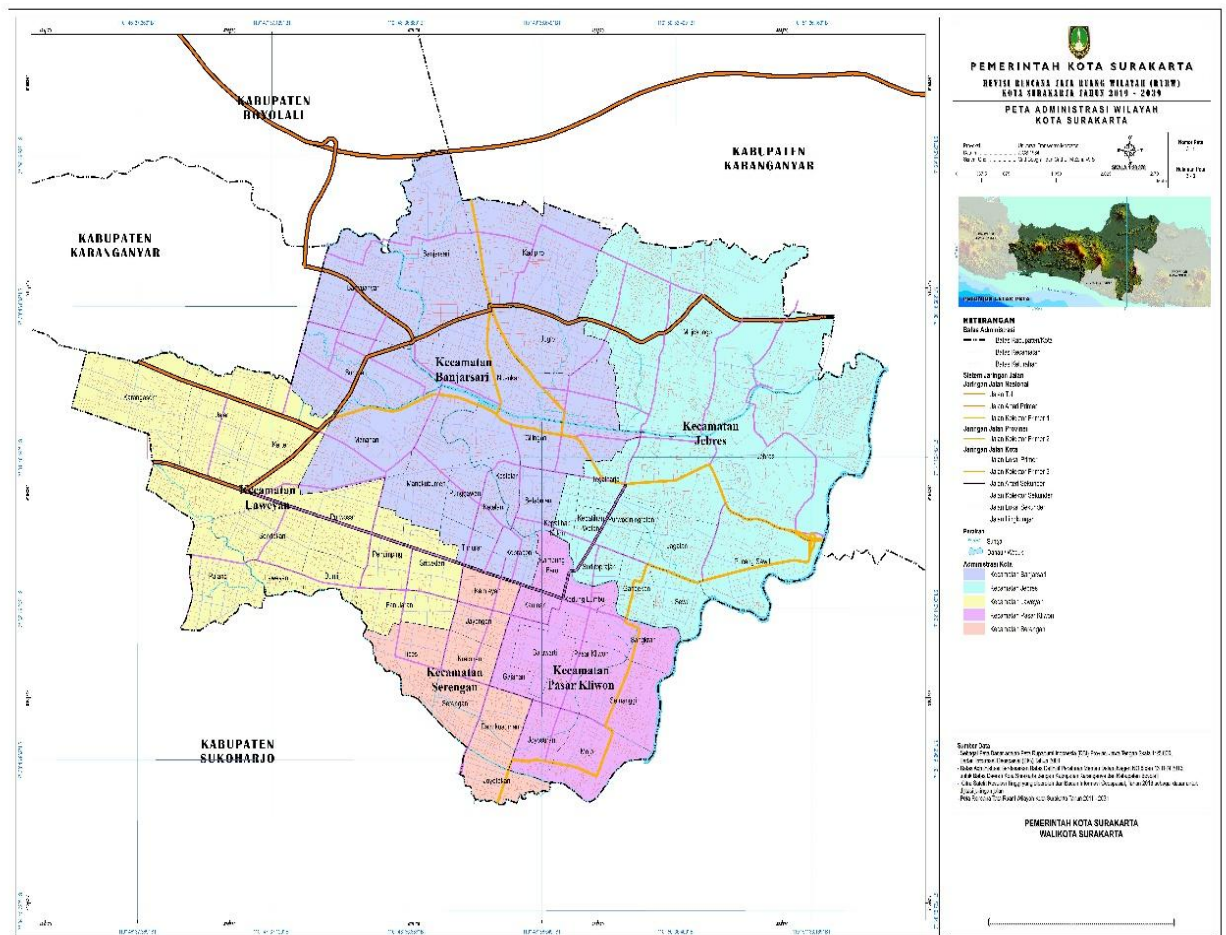
BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA

A. Kondisi Administrasi Wilayah

Kota Surakarta terletak antara 110°45'15" – 110°45'35" Bujur Timur dan 7°36'00" – 7°56'00" Lintang Selatan. Wilayah ini termasuk dataran rendah dengan ketinggian ± 92 meter dari permukaan laut dan dilalui oleh sungai Pepe, Jenes, Anyar dan Bengawan Solo. Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 Km². Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW)

Gambar 4.1 Peta Kota Surakarta



Sumber : Bagian Pemerintah Umum Setda Kota Surakarta, 2021

Perbatasan administrasi wilayah Kota Surakarta, menurut RTRW Kota Surakarta tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut:

- Batas Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali
- Batas Selatan : Kabupaten Sukoharjo
- Batas Timur : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar
- Batas Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

Secara rinci pembagian wilayah administrasi di Kota Surakarta dapat dilihat dalam tabel 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

Kecamatan	Kelurahan	(2Luas Wilayah(Km	RW	RT
Laweyan	11	9,126	105	458
Serengan	7	3,083	72	313
Pasar Kliwon	10	4,882	101	437
Jebres	11	14,377	153	651
Banjarsari	15	14,810	195	930
Kota Surakarta	54	46,724	626	2.789

Sumber: SK Walikota Surakarta No. 146.3/12.2 Tahun 2020 tentang Batas Kecamatan dan Kelurahan, SK Walikota No. 149.1/30 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Tetangga Kota Surakarta, dan SK Walikota No. 149.1/31 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Warga Kota Surakarta

Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan, 54 kelurahan, 626 RW dengan jumlah RT sebanyak 2.786. Kecamatan Banjarsari memiliki wilayah yang paling luas, yaitu 14,810 km² dan Kecamatan Serengan memiliki wilayah paling kecil, yaitu 3,083 km². Dengan kondisi ini, Kecamatan Banjarsari memiliki kelurahan terbanyak yaitu 15 kelurahan, dan paling sedikit di Kecamatan Serengan, yaitu sebanyak 7 kelurahan. Jumlah RW terbanyak terdapat di Kecamatan Banjarsari yaitu sebanyak 195 dengan jumlah RT sebanyak 930. Jumlah RW dan RT yang

paling kecil adalah Kec, Serengan yaitu sebanyak 72 RW dan 313 RT.

B. Kondisi Geografis

Kota Surakarta secara geografis berada antara 110°45'15"- 110°45'35" Bujur Timur dan 7°36'00"- 7°56'00" Lintang Selatan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta. Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan "Kota Solo" termasuk daerah dataran rendah yang memiliki ketinggian antara ±92 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lahan antara 0% hingga 15%. Berikut adalah tabel yang menunjukkan kondisi topografi Kota Surakarta ditinjau dari ketinggian dan kemiringan lahan tiap kecamatan.

Tabel 4.2.
Kondisi Topografi Kota Surakarta

Kecamatan	Ketinggian Tempat (m dpl)	Kemiringan Tanah
Kec. Laweyan	90 – 100	0 – 2 %
Kec. Serengan	80 – 100	0 – 2 %
Kec. Pasar Kliwon	80 – 95	0 – 2 %
Kec. Jebres	90 – 120	2 – 15%
Kec. Banjarsari	85 – 100	0 – 2 %
Kota Surakarta	80 - 120	0 – 15%

Sumber: BPS Kota Surakarta (2021)

Kota Surakarta tergolong dalam iklim tropis, yaitumemiliki bulan kering mencapai 5 bulan (Mei-September) dan bulan basah sebanyak 7 bulan (Oktober-April)dengan dengan suhu rata-rata 24,8°C sampai 18,1°C. Tingkat Kelembaban tergolong sedang yaitu berkisar antara 66-84%. Sedangkanpenyinaran matahari di Kota Surakarta tertinggi terjadi pada bulan Agustus atau September dengan radiasi matahari antara 80–84%, sementara penyinaran terendah terjadi pada

bulan Desember atau Januari dengan radiasi matahari sekitar 48 – 50%. Tekanan udara antara 1.007-1011 atmosfer, rata-rata sebesar 1.010 atmosfer. Kondisi Curah hujan pada tahun 2011 sebesar 2.548,50 mm/th, lebih rendah dibandingkan tahun 2010 sebesar 3.408 mm/thn dan tahun 2009 sebesar 2.332,5 mm/th.

C. Kondisi Rencana Struktur Ruang

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta tahun 2011-2031 dijelaskan bahwa Kota Surakarta memiliki satu Pusat Pelayanan Kota (PPK) yang membawahi 6 Sistem Pusat Pelayanan Kota.

Tabel 4.3
Pembagian Sistem Pusat Pelayanan Kota Surakarta Tahun 2011-2031

No	Sub Pusat Pelayanan Kota	Kecamatan Tercakup	Arah Fungsi Kawasan
1	I	Kec. Jebres, Laweyan, Pasar Kliwon, Serengan	Pariwisata Budaya, Perdagangan dan jasa, olahraga, Industri kreatif
2	II	Kec. Banjarsari, dan Laweyan	Pariwisata, olahraga, Industri kreatif
3	III	Kec. Banjarsari	Permukiman, perdagangan dan jasa
4	IV	Kec. Banjarsari dan Kec. Jebres	Permukiman, perdagangan dan jasa, Industri kecil dan industri ringan
5	V	Kec. Banjarsari dan Kec. Jebres	Pariwisata, Pendidikan Tinggi, Industri kreatif
6	VI	Kec. Banjarsari, Kec. Jebres, Kec. Laweyan	Pemerintahan, Pariwisata budaya, Perdagangan dan Jasa

Sumber: RTRW Kota Surakarta, 2011-2031

D. Kondisi Pertumbuhan UMKM di Kota Surakarta

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor tumpuan bagi Kota Surakarta, tercermin dari pertumbuhan dalam hal jumlah unit usaha. Hingga tahun 2020 tercatat 1.235 unit usaha kecil dan menengah di Kota Surakarta, serta 164 usaha kreatif dan 6010 usaha non formal yang berpotensi mencakup pelaku usaha level mikro. Keberadaan UMKM Kota Surakarta memiliki jumlah lebih baik dibanding daerah berkarakteristik urban lainnya di wilayah Jawa Tengah (Padwangi, 2019). Badan Pusat Statistik Kota Surakarta mencatat bahwa hingga tahun 2020 terdapat 275 usaha menengah, 960 usaha kecil, dan 6174 usaha kreatif dan non formal di mana usaha mikro berpotensi masuk di dalamnya. Jumlah unit usaha meningkat sebesar 0,14% dibanding tahun 2019, dan tingkat pertumbuhan ini masuk dalam kategori baik apabila mengacu pada Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020.

Tabel 4.4
Pertumbuhan UMKM di Kota Surakarta

Jenis Industri	Tahun		Pertumbuhan
	2019	2020	
Menengah	271	275	1.48%
Kecil	954	960	0.63%
Kreatif	164	164	0.00%
Non Formal	6010	6010	0.00%
Total Pertumbuhan			0.14%

Sumber: Surakarta dalam Angka 2021

Secara lebih spesifik dalam mengklasifikasikan UMKM berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta, terdapat 43.804 unit UMKM per tahun 2017 di Kota Surakarta. Kuantitas ini terdiri dari 41.512 usaha berskala mikro, 2.197 usaha berskala kecil, dan 95 usaha berskala menengah. Meski begitu, dari besarnya jumlah unit UMKM tersebut hanya sebanyak 2.978 unit usaha saja yang sudah menjadi UMKM binaan Pemerintah Kota Surakarta. Dengan

demikian, masih terdapat 40.826 unit usaha potensial untuk dikembangkan melalui program-program pendampingan dan pembinaan. Pembinaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM di Kota Surakarta terus berfokus pada upaya pemasaran produk yang selama ini terkendala karena kebanyakan ritel atau lapak modern memberikan persyaratan berupa ijin produk atau sertifikasi-sertifikasi lainnya.

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Surakarta terus menunjukkan arah yang signifikan. Dapat dilihat secara umum penyerapan tenaga kerja daerah tidak terlepas dari kontribusi UMKM (Sathish & Rajamohan, 2018). UMKM yang ada di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia hingga 96%. Berdasarkan data tahun 2018 jumlah usaha mikro mencapai 58,91 juta, Jumlah usaha kecil sejumlah 59,260 juta, jumlah usaha menengah 4,987 juta. Di Indonesia, total UMKM pada tahun 2018 mampu menyerap sebanyak 64,2 juta.

Sektor Usaha Menengah, Kecil, dan Industri Kreatif dan Nonformal yang memungkinkan menyerap usaha mikro di Kota Surakarta mampu menyerap sebanyak 33.027 tenaga kerja. Sektor usaha kecil dan menengah menyerap paling banyak tenaga kerja yaitu sebesar 16.422 tenaga kerja pada tahun 2020. Sementara itu, jumlah penduduk angkatan kerja di Kota Surakarta adalah 288.959 penduduk, dimana 266.082 atau 63,39% dari penduduk berusia 15 tahun ke atas merupakan penduduk yang memiliki pekerjaan.

Tabel 4.5
Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surakarta

Skala Usaha	Penyerapan Tenaga Kerja	
	2019	2020
Besar	13.089	13.391
Menengah	7.794	7.85
Kecil	8.545	8.572
Kreatif	164	164
Non Formal	16.441	16.441

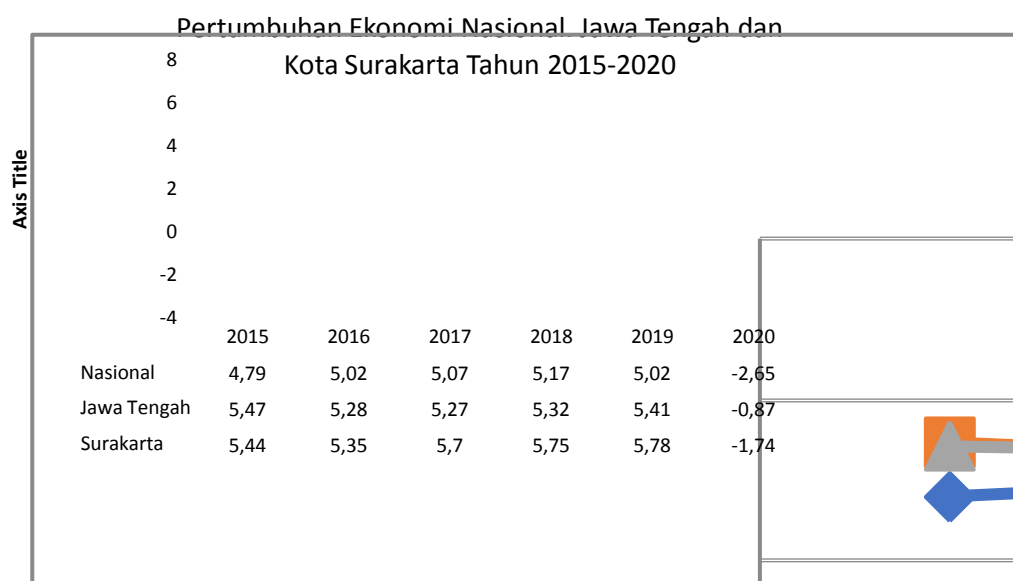
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2021)

E. Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi ekonomi daerah dan kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu dapat dilihat dari nilai dan sebaran PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, sebagai contoh perhitungan PDRB di Indonesia menggunakan tahun dasarnya yaitu tahun 2010.

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta terlihat fluktuasi, meskipun nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan nasional sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.



Gambar 4.2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Provinsi Jateng dan Nasional
Tahun 2015 Sampai dengan 2020

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dalam rentang waktu tahun 2015 sampai dengan 2020 menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami tren kenaikan yaitu sebesar 0,3%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, pada periode tahun 2017 sampai dengan 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta diatas Jawa Tengah, sedangkan tahun 2021 dikarenak pandemic covid 19, pertumbuhan ekonomi nasional hingga daerah mengalami penurunan, terlihat Surakarta mengalami penurunan 1,74% lebih turun daripada Jawa tengah yang hanya turun sebesar 0,87%.

Pada tahun 2020 sektor primer di Kota Surakarta terdiri dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan total mencapai Rp. 234,24 milyar. Sektor sekunder dengan sektor industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, kontruksi memberikan kontribusi total sebesar Rp. 17.234,76 miliar. Pada tahun 2015–2019 sektor tersier memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB Kota Surakarta sangat fluktuatif. PDRB sektor tersier merupakan sektor ekonomi yang berkaitan dengan nilai tambah yang diperoleh dari proses pengolahan informasi, daya cipta, organisasi dan koordinasi antar manusia sehingga tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor ini meliputi lapangan usaha perdagangan, restoran, hotel, angkutan, keuangan, komunikasi, dan jasa-jasa. Sedangkan sektor tersier mendominasi struktur ekonomi terhadap PDRB Kota Surakarta pada tahun 2019. Sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa memberikan sumbangan terhadap PDRB Kota Surakarta secara keseluruhan mencapai Rp. 24.303,91 miliar.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Surakarta mengalami tren yang fluktuatif dalam kurun 3 tahun terakhir.

Tabel 4.6
PDRB Kota Surakarta atas Dasar Harga Berlaku

Kategori		PDRB-ADHB (Juta Rupiah)			Laju Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	219,281.71	233,444.75	243,528.14	6.46%	4.32%
B.	Pertambangan dan Penggalian	308.35	289.08	281.60	-6.25%	-2.59%
C.	Industri Pengolahan	3,755,541.63	4,060,045.30	4,024,918.64	8.11%	-0.87%
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	89,447.76	94,467.61	95,484.59	5.61%	1.08%
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	64,543.46	68,562.82	74,921.49	6.23%	9.27%
F.	Konstruksi	12,059,892.39	13,011,418.38	12,883,929.92	7.89%	-0.98%
G.	Perdagangan Besar, & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	9,840,818.19	10,635,516.54	10,306,413.83	8.08%	-3.09%
H.	Transportasi dan Pergudangan	1,133,736.50	1,241,375.56	488,770.97	9.49%	- 60.63%
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,438,524.86	2,596,798.29	2,179,997.16	6.49%	- 16.05%
J.	Informasi dan Komunikasi	5,182,973.52	5,764,427.29	6,929,679.08	11.22%	20.21%
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,704,370.50	1,805,302.07	1,856,884.85	5.92%	2.86%
L.	Real Estate	1,760,865.00	1,846,239.69	1,890,733.35	4.85%	2.41%
M, N.	Jasa Perusahaan	372,415.59	414,236.87	387,892.84	11.23%	-6.36%
O.	Administrasi Pemerintahan,	2,459,805.65	2,594,387.03	2,567,427.62	5.47%	-1.04%

Kategori		PDRB-ADHB (Juta Rupiah)			Laju Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2019	2020
	Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib					
P.	Jasa Pendidikan	2,425,953.87	2,643,711.13	2,688,467.54	8.98%	1.69%
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	499,078.89	535,372.96	622,766.87	7.27%	16.32%
R, S, T, U.	Jasa Lainnya	422,259.08	456,680.62	402,465.17	8.15%	- 11.87%
PDRB		44,429,816.95	48,002,275.99	47,644,563.66	8.04%	-0.75%

Sumber: Surakarta dalam Angka 2021 (Badan Pusat Statistik Kota Surakarta)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta tahun 2020 adalah Rp 47.644,56 miliar, atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan PDRB senilai Rp 48.002,28 miliar. Angka tersebut didominasi oleh sektor Konstruksi dengan sumbangan Rp 12.883,93 miliar, dan paling sedikit di sektor Pertambangan dan Penggalian dengan sumbangan hanya Rp 0,28 miliar. Surakarta menjadi penyumbang PDRB tertinggi ke-2 Kota di bawah Semarang dan berada di urutan ke-5 Kota/ Kabupaten terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2019.

Tabel 4.7

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta Tahun 2016-2020 (miliar rupiah)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	195,99	204,86	219,28	233,44	243,53
B	Pertambangan dan Penggalan	0,78	0,80	0,80	0,80	0,28
C	Industri Pengolahan	3.254,99	3.494,99	3.755,20	4.060,31	4.024,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	74,05	82,62	89,45	94,47	95,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	57,52	61,51	64,54	68,56	74,92
F	Konstruksi	10.191,82	10.991,14	12.059,89	13.011,42	12.883,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.491,04	9.172,70	9.840,82	10.635,52	10.306,41
H	Transportasi dan Pergudangan	991,64	1.063,36	1.133,74	1.241,38	488,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.203,00	2.322,96	2.438,52	2.596,80	2.180,00
J	Informasi dan Komunikasi	3.495,72	4.623,42	5.182,97	5.764,43	6.929,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.456,90	1.592,35	1.704,37	1.805,30	1.856,88
L	Real Estate	1.555,46	1.673,99	1.760,87	1.846,24	1.890,73
M,N	Jasa Perusahaan	307,94	332,37	372,42	414,24	387,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.250,74	2.351,65	2.459,81	2.594,39	2.567,43
P	Jasa Pendidikan	2.017,34	2.228,48	2.425,95	2.643,71	2.688,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	416,39	453,53	499,08	535,37	622,77
R,S,T,U	Jasa lainnya	360,30	391,61	422,26	456,68	402,47
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	37.321,62	41.042,34	44.429,97	48.003,06	47.644,56

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2021

Kinerja perekonomian saat ini dapat dilihat pada tabel 3.3 yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dari tahun 2015-2019. Nilai PDRB Kota Surakarta berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan pada setiap tahun. PDRB ADHB pada tahun 2016 tercatat 37.321,62 miliar rupiah kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 41.042,34 miliar rupiah. Pada tahun 2018 PDRB ADHB Kota Surakarta mencapai 44.429,97 miliar rupiah, meningkat dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 41.042,34 miliar rupiah. Peningkatan terus berlanjut hingga pada tahun 2019, PDRB ADHB Kota Surakarta mencapai 48.003,06 miliar rupiah, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 47.644,56 miliar rupiah dikarenakan pandemic covid dunia.

Kinerja perekonomian Kota Surakarta selama lima tahun terakhir dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB Kota Surakarta berdasarkan harga konstan 2010 (ADHK 2010) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020. PDRB ADHK pada tahun 2020 tercatat sebesar 47.644,56 miliar rupiah, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 48.003,06 miliar rupiah. Angka PDRB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan berbagai variasi. Hal ini dapat dimaklumi karena ada kebijakan kebijakan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian Kota Surakarta. Laju pertumbuhan ekonomi dua tahun terakhir mulai membaik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir adalah 5,78%.

Tabel 4.8**PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta Tahun 2016-2020 (miliar rupiah)**

Kategori	Uraian	2016	2017	2018*	2019**	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	131,45	136,49	141,98	146,20	149,00
B	Pertambangan dan Penggalian	0,53	0,53	0,52	0,51	0,17
C	Industri Pengolahan	2.348,38	2.450,41	2.556,98	2.707,25	2.598,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	69,16	72,11	75,71	79,65	80,92
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	50,64	53,82	56,32	58,99	60,89
F	Konstruksi	7.865,55	8.273,64	8.688,09	9.090,51	8.913,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.033,10	7.432,99	7.800,99	8.205,09	7.779,82
H	Transportasi dan Pergudangan	859,86	908,89	960,62	1.030,90	384,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.538,03	1.605,81	1.672,61	1.759,78	1.483,95
J	Informasi dan Komunikasi	3.951,53	4.368,73	4.897,77	5.393,51	6.455,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.042,31	1.094,71	1.131,38	1.476,58	1.206,75
L	Real Estate	1.329,67	1.398,27	1.433,84	1.476,56	1.482,89
M,N	Jasa Perusahaan	224,93	234,95	256,24	280,67	256,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.661,47	1.682,11	1.732,86	1.800,42	1.761,68
P	Jasa Pendidikan	1.273,57	1.333,73	1.411,14	1.495,59	1.481,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	305,89	328,18	357,00	379,10	425,01
R,S,T,U	Jasa lainnya	289,80	310,10	332,18	356,88	305,78
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	29.975,87	31.685,47	33.506,23	35.738,19	34.827,19

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2020

Tabel 4.9
Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta
Tahun 2016-2020

Kategori	Lapangan Usaha /Industry	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,52	0,5	0,49	0,49	0,51
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0,00
C	Industri Pengolahan	8,62	8,52	8,45	8,46	8,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,2	0,2	0,2	0,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,14	0,16
F	Konstruksi	26,98	26,78	27,14	27,11	27,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,48	22,35	22,15	22,16	21,63
H	Transportasi dan Pergudangan	2,63	2,59	2,55	2,59	1,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,83	5,66	5,49	5,41	4,58
J	Informasi dan Komunikasi	10,45	11,27	11,67	12,01	14,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,86	3,88	3,84	3,76	3,90
L	Real Estate	4,12	4,08	3,96	3,85	3,97
M,N	Jasa Perusahaan	0,82	0,81	0,84	0,86	0,81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,96	5,73	5,54	5,4	5,39
P	Jasa Pendidikan	5,33	5,43	5,46	5,51	5,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,1	1,11	1,12	1,12	1,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,95	0,95	0,95	0,95	0,84
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100,00

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2021

Berdasarkan distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha Kota Surakarta tahun 2016-2020, dari 17 sektor-sektor penyusun PDRB tersebut kontribusi per sektoral

didominasi oleh sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor komunikasi dan informasi. Pada tahun 2020, kontribusi sektor konstruksi menyumbang 27,04%, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 21,63%, dan sektor komunikasi dan informasi sebesar 14,54%.

F. KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 sebanyak 522.364 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 257.043 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 291.935 jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin di Kota Surakarta sebesar 0,969, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dilihat dari tren perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,44% pada tahun 2020.

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 sebanyak 522.364 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 257.043 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 291.935 jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin di Kota Surakarta sebesar 0,969, hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dilihat dari tren perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,44% pada tahun 2020.

Kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 11.861,13 jiwa/km², menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 13.061,53 jiwa/km². Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk rasio jenis kelamin dan kepadatan penduduk Kota Surakarta dari tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2016 – 2020

No	Variabel	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk	514.171	516.102	517.887	575.230	522.364
	Laki-laki	249.978	250.896	251.772	283.295	257.043
	Perempuan	264.193	265.206	266.115	291.935	265.321
2.	% Laju Pertumbuhan	0,380	0,376	0,346	0,97	0,44
3.	Rasio Jenis kelamin	0,95	0,95	0,95	0,97	0,969
4.	Kepadatan Penduduk (² jiwa/km)	11.674,93	11.718,78	11.759,31	13.061,53	11.861,13

Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2021.

Persebaran penduduk Kota Surakarta tahun 2020 berdasarkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banjarsari mencapai sebesar 168.770 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk terendah adalah Kecamatan Serengan yaitu sebesar 47.778 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11
Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Laweyan	88.524	10.245,83
2	Serengan	47.778	14.977,43
3	Pasar Kliwon	78.517	16.289,83
4	Jebres	138.775	11.031,40
5	Banjarsari	168.770	11.395,68
	Surakarta	522.364	11 861,13

Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2021

Tabel 4.12
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Gender Tahun 2020

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	4-0	17.758	17.107	34.865
2	9-5	18.280	17.884	36.164
3	14-10	20.187	19.149	39.336
4	19-15	21.200	20.516	41.716
5	24-20	20.638	20.444	41.082
6	29-25	19.983	19.590	39.573
7	34-30	19.246	18.803	38.049
8	39-35	19.913	19.865	39.778
9	44-40	20.038	20.383	40.421
10	49-45	18.297	18.958	37.255
11	54-50	16.818	18.118	34.936
12	59-55	14.282	16.189	30.471
13	64-60	11.909	13.749	25.658
14	69-65	9.065	10.993	20.058
15	74-70	5.015	6.176	11.191
16	75≤	4.414	7.397	11.811
Jumlah		257.043	265.321	522.364

Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2021

G. Isu Strategis RPJMD Kota Surakarta 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta 2005-2025, dan secara spesifik dalam jangka yang lebih singkat lagi terutama untuk menghadapi dampak pandemi global Covid-19 yang luas, perlu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Berpedoman pada Pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dokumen RPJMD disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan, meliputi: (i) pendekatan teknokratis, (ii) pendekatan partisipatif, (iii) pendekatan politis, dan (iv) pendekatan perpaduan antara bottom-up dengan top-down planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan melalui musyawarah di tingkat Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Adapun ringkasan isu strategis yang dimuat dalam RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Tata kelola pemerintahan yang gesit, cerdas, kolaboratif, inovatif dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal

- a. Penataan sumber daya aparatur berbasis sistem merit.
- b. Pengendalian manajemen risiko kebijakan tata laksana organisasi dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah
- c. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berbasis data terpadu dan akurat.
- d. Optimalisasi layanan Fungsi DPRD
- e. Pengembangan sistem pengendalian arsip secara elektronik
- f. Penguatan kapasitas Fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- g. Penguatan Kerja sama Regional, Kerja sama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan kerja sama dengan kelompok masyarakat
- h. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi dan pelayanan publik
- i. Kolaborasi lintas sektor untuk memproduksi, pemasaran dan pemanfaatan inovasi daerah
- j. Pemanfaatan data kependudukan melalui sistem terintegrasi

2. Pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, berkarakter unggul dan tangguh

- a. Optimalisasi pemerataan akses dan kualitas pendidikan sepanjang hayat.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan masyarakat berbasis keluarga.
- c. Pengembangan pemuda dan masyarakat yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing
- d. Penguatan daya saing tenaga kerja untuk merespon kebutuhan pasar kerja
- e. Penguatan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak.
- f. Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif dan berbudaya unggul, dan mendukung pengendalian laju pertumbuhan penduduk
- g. Penguatan keswadayaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan.
- h. Pengembangan seni budaya sebagai atraksi wisata dan pelestarian nilai-nilai budaya

3. Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan

- a. Pengembangan Pariwisata dengan fokus: kota MICE, Wiskulja dan Ekonomi Digital berbasis konsep *Eco Cultural City*
- b. Penguatan Pertumbuhan ekonomi Inklusif: bauran ekonomi digital dengan ekonomi konvensional mewujudkan Smart city
- c. Penguatan keterjaminan ketersediaan pangan dan keamanan pangan
- d. Peningkatan daya tarik investasi
- e. Pengembangan ekonomi kreatif dan penguasaan teknologi
- f. Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM.

4. Infrastruktur dan lingkungan kota yang sehat, nyaman, berbudaya dan tangguh.

- a. Isu infrastruktur dan penataan lingkungan mendukung industri pariwisata dan pemajuan budaya
- b. Pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi.
- c. Pemenuhan fasilitas umum lingkungan permukiman yang sehat.

- d. Pengelolaan lingkungan sehat dan antisipasi risiko perubahan iklim.

5. Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif dan Pembangunan Kota yang kondusif

- a. Isu Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan
- b. Penguatan pencegahan risiko gangguan yang membuat daerah tidak kondusif dan Manajemen risiko bencana.

H. Terobosan Strategi melalui Perencanaan berbasis Penelitian dan Pembangunan berbasis Perencanaan

Terkait dengan perencanaan pembangunan, isu-isu strategis RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 memberikan dukungan penuh terhadap daya saing dan inovasi daerah. Rencana Pembangunan ini mengangkat isu yang terkait erat dengan kolaborasi, penerapan inovasi, kreativitas, *sustainability*, dan pengangkatan nilai budaya untuk mensejahterakan masyarakat dalam 5 tahun kedepan. Artinya, RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 memberikan perhatian penuh terhadap *sustainability* dan kemampuan bersaing Kota Surakarta, terutama melalui penerapan teknologi digital dan informatika. Lebih dari itu, dukungan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 terhadap daya saing daerah merupakan perencanaan strategis yang relevan karena penunjang terhadap daya saing daerah merupakan kebutuhan yang mendesak terlebih yang bersentuhan dengan penerapan inovasi teknologi dan digitalisasi terutama di masa 5 tahun ke depan yang merupakan tahun-tahun responsif dan adaptif terhadap dampak pandemi global Covid-19.

BAB V

ANALISIS DAYA SAING DAERAH KOTA SURAKARTA

A. Identifikasi Peluang/ Kendala & Inventarisasi Urgensi

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Indonesia disusun mengacu pada Kuesioner Pemetaan Ekosistem Inovasi oleh Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kuesioner IDSD tersusun berdasarkan 4 aspek yang terdiri dari 12 pilar, dan 23 dimensi, dan secara spesifik memuat 97 indikator yang dijadikan item pengukuran.

Pada tahun 2021 Kota Surakarta telah menjawab seluruh 97 indikator dengan data dukung yang relevan, sehingga dapat diukur perkembangan tingkat daya saing pada Kota Surakarta. Dari 97 indikator yang diukur dengan skala 1 (level daya saing paling rendah) hingga skala 5 (level daya saing paling tinggi), terdapat hasil yang variatif. Meski begitu, daya saing Kota Surakarta sudah didominasi oleh level 5 yaitu sebanyak 68 indikator. Sementara itu hanya terdapat 3 indikator saja yang merupakan level daya saing 1, dan 5 indikator yang merupakan level daya saing 2. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Surakarta merupakan daerah yang memiliki kecenderungan berdaya saing sangat baik. Daya saing Kota Surakarta ini didukung oleh sector konstruksi, perdagangan, dan informasi komunikasi terhadap PDRB.

Tabel 5.1
PDRB Kota Surakarta atas Dasar Harga Berlaku

Kategori	PDRB-ADHB (Juta Rupiah)			Laju Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2019	2020
Pertanian,					
A. Kehutanan,	219,281.71	233,444.75	243,528.14	6.46%	4.32%
dan Perikanan					
B. Pertambangan	308.35	289.08	281.60	-6.25%	-2.59%

Kategori	PDRB-ADHB (Juta Rupiah)			Laju Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2019	2020
dan					
Penggalian					
C. Industri	3,755,541.63	4,060,045.30	4,024,918.64	8.11%	-0.87%
Pengolahan					
Pengadaan					
D. Listrik dan	89,447.76	94,467.61	95,484.59	5.61%	1.08%
Gas					
Pengadaan					
Air,					
E. Pengelolaan	64,543.46	68,562.82	74,921.49	6.23%	9.27%
Sampah,					
Limbah dan					
Daur Ulang					
F. Konstruksi	12,059,892.39	13,011,418.38	12,883,929.92	7.89%	-0.98%
Perdagangan					
Besar, &					
G. Eceran;	9,840,818.19	10,635,516.54	10,306,413.83	8.08%	-3.09%
Reparasi					
Mobil &					
Sepeda Motor					
Transportasi					
H. dan	1,133,736.50	1,241,375.56	488,770.97	9.49%	-60.63%
Pergudangan					
Penyediaan					
I. Akomodasi	2,438,524.86	2,596,798.29	2,179,997.16	6.49%	-16.05%
dan Makan					
Minum					
J. Informasi dan	5,182,973.52	5,764,427.29	6,929,679.08	11.22%	20.21%
Komunikasi					
K. Jasa	1,704,370.50	1,805,302.07	1,856,884.85	5.92%	2.86%
Keuangan dan					

Kategori	PDRB-ADHB (Juta Rupiah)			Laju Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2019	2020
Asuransi					
L. Real Estate	1,760,865.00	1,846,239.69	1,890,733.35	4.85%	2.41%
M, Jasa					
N. Perusahaan	372,415.59	414,236.87	387,892.84	11.23%	-6.36%
Administrasi					
Pemerintahan,					
O. Pertahanan &	2,459,805.65	2,594,387.03	2,567,427.62	5.47%	-1.04%
Jaminan					
Sosial Wajib					
Jasa					
P. Pendidikan	2,425,953.87	2,643,711.13	2,688,467.54	8.98%	1.69%
Jasa					
Q. Kesehatan					
dan Kegiatan	499,078.89	535,372.96	622,766.87	7.27%	16.32%
Sosial					
R,					
S,					
T,					
U. Jasa Lainnya	422,259.08	456,680.62	402,465.17	8.15%	-11.87%
PDRB	44,429,816.95	48,002,275.99	47,644,563.66	8.04%	-0.75%

Sumber: Surakarta dalam Angka 2021 (Badan Pusat Statistik Kota Surakarta)

PDRB Kota Surakarta tahun 2020 adalah Rp 47.644.563.660.000, mengalami penurunan sebesar 0,75% dibandingkan dengan PDRB tahun 2019 yang mencapai Rp 48.002.275.990.000. Sektor konstruksi merupakan penyumbang PDRB tertinggi dalam tiga tahun terakhir dengan kontribusi sebesar 27% pada tahun 2020. Angka tersebut diikuti oleh sumbangan dari sektor Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi 21,63% terhadap PDRB Kota Surakarta. Sektor pertambangan dan penggalan merupakan sektor yang tidak populer di Kota Surakarta karena hanya menyumbang kurang dari 0,01% terhadap PDRB Kota Surakarta, dan angka tersebut terus mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2020.

Secara rinci, proporsi penggunaan konsumsi akhir terhadap PDRB Kota Surakarta terbagi ke dalam Rumah Tangga, Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), dan Pemerintah. Pada tahun 2020 penggunaan konsumsi akhir terhadap PDRB terbesar adalah dari Rumah Tangga, yaitu sebesar Rp 24.540,85 miliar. Pada tahun 2020 proporsi penggunaan PDRB untuk konsumsi adalah sebesar 61,70%.

Tabel 5.2

Proporsi Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Surakarta 2018-2020 (miliar rupiah)

Uraian	2018	2019	2020
Konsumsi Akhir (ADHB)			
a. Rumah Tangga	22,587.79	24,210.99	24,540.85
b. LNPRT	278.35	312.57	291.07
c. Pemerintah	4,873.87	5,090.82	4,566.20
Jumlah	27,740.01	29,614.38	29,398.12
PDRB ADHB	44,429.82	48,002.28	47,644.56
Proporsi Konsumsi	62.44%	61.69%	61.70%

Sumber: Surakarta dalam Angka 2021 (Badan Pusat Statistik Kota Surakarta)

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik (Kota Surakarta), tetapi diperdagangkan ke luar Kota Surakarta. Untuk menghasilkan produk yang diekspor dihitung menggunakan kapital, atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sementara itu sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang-barang kapital.

Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB). Rasio ekspor terhadap PMTB Kota Surakarta termuat dalam Tabel 2.3.

Tabel 5.3
Rasio Ekspor terhadap PMTB Kota Surakarta (miliar rupiah)

Uraian	2018	2019	2020
Konsumsi Akhir (ADHB)			
Total Nilai Ekspor (ADHB)	17,100.64	18,444.11	15,662.37
Total Nilai PMTB (ADHB)	31,167.73	33,871.41	30,617.43
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0.55%	0.54%	0.51%

Sumber: Surakarta dalam Angka 2021 (Badan Pusat Statistik Kota Surakarta)

Dari Tabel 5.3 didapatkan total nilai ekspor Kota Surakarta lebih kecil dibanding nilai PMTB, sehingga rasionya kurang dari 1. Rata-rata rasio ekspor terhadap PMTB selama 3 (lima) tahun terakhir sebesar 0,53. Nilai rasio ini terus menurun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, karena perkembangan nilai ekspor yang berbeda dengan perkembangan nilai PMTB.

Rasio Perbandingan PDRB terhadap Impor memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data rasio tersebut dapat menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan dari luar Kota Surakarta. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi dan sebaliknya.

Tabel 5.4 dibawah ini menunjukkan bahwa rata-rata rasio PDRB terhadap impor Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 sebesar 1,49. Peningkatan rasio dari tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan semakin menurunnya kebutuhan masyarakat Kota Surakarta terhadap impor.

Tabel 5.4
Rasio PDRB terhadap Impor Kota Surakarta (miliar rupiah)

Uraian	2018	2019	2020
Konsumsi Akhir (ADHB)			
Total Impor (ADHB)	31,893.70	34,219.65	28,333.41
PDRB (ADHB)	44,429.82	48,002.28	47,644.56
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1.39%	1.40%	1.68%

Sumber: Surakarta dalam Angka 2021 (Badan Pusat Statistik Kota Surakarta)

Tingkat ketergantungan (ketidakseimbangan) ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (supply) dengan total permintaan akhir (demand). Sisi keseimbangan penyediaan (supply) dan permintaan akhir (demand) tersaji dalam Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Keseimbangan Penyediaan & Permintaan Kota Surakarta (miliar Rupiah)

Uraian	2018	2019	2020
Konsumsi Akhir (ADHB)			
Total Penyediaan PDRB (ADHB)	44,429.82	48,002.28	47,644.56
Persentase Penyediaan PDRB	58.21%	58.38%	62.71%
Total Nilai Impor ADHB	31,893.70	34,219.65	28,333.41
Persentase Nilai Impor ADHB	41.79%	41.62%	37.29%
Total Permintaan Akhir	76,323.52	82,221.93	75,977.97
Persentase Permintaan Akhir	100%	100%	100%

Sumber: Surakarta dalam Angka 2021 (Badan Pusat Statistik Kota Surakarta)

Berdasarkan Tabel 5.5 dapat dicerminkan bahwa pada periode Tahun 2018 – 2020 Kota Surakarta masih bergantung terhadap produk dari luar wilayah Kota Surakarta sebesar 37,29 - 41,79 persen untuk memenuhi

permintaan akhir domestiknya. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 58,21 - 62,71 persen dari hasil produksi domestik.

Sementara itu nilai penyediaan produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik sebesar 44,42 triliun rupiah pada Tahun 2018 dan terus meningkat menjadi 48,00 triliun rupiah pada Tahun 2019 kemudian turun menjadi senilai 47,64 triliun rupiah pada Tahun 2020. Sehingga nilai dari berbagai produk barang dan jasa yang diimpor merupakan nilai dari kebutuhan masyarakat Kota Surakarta yang tidak dapat dicukupi oleh hasil produksi domestik pada tahun yang bersesuaian.

B. Indeks Daya Saing Kota Surakarta Tahun 2021

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Indonesia disusun mengacu pada Kuesioner Pemetaan Ekosistem Inovasi oleh Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kuesioner IDSD tersusun berdasarkan 4 aspek yang terdiri dari 12 pilar, dan 23 dimensi. Keduapuluh tiga dimensi, secara lebih spesifik memuat 97 indikator yang dijadikan item pengukuran.

Pada tahun 2021 Kota Surakarta telah menjawab seluruh 97 indikator dengan data dukung yang relevan, sehingga dapat diukur perkembangan tingkat daya saing pada Kota Surakarta. Dari 97 indikator yang diukur dengan skala 1 (level daya saing paling rendah) hingga skala 5 (level daya saing paling tinggi), terdapat hasil yang variatif. Meski begitu, daya saing Kota Surakarta sudah didominasi oleh level 5 yaitu sebanyak 67 indikator. Sementara itu hanya terdapat 3 indikator saja yang merupakan level daya saing 1, dan 5 indikator yang merupakan level daya saing 2. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Surakarta merupakan daerah yang memiliki kecenderungan berdaya saing sangat baik.

Tabel 5.6
Sebaran Level Daya Saing Kota Surakarta 2020-2021

No.	Level Indikator IDSD	2020	2021
1	Level 1	2	3
2	Level 2	6	5
3	Level 3	13	12
4	Level 4	21	10
5	Level 5	55	67
JUMLAH INDIKATOR		97	97

Sumber: Hasil Pengukuran IDSD 2021

Berdasarkan sebaran level yang ditunjukkan pada tabel 5.6, secara umum terjadi peningkatan kemampuan daya Saing Surakarta dari tahun 2020 ke tahun 2021, dicerminkan oleh meningkatnya jumlah indikator yang berada di level 5. Pada tahun 2020 terdapat 55 indikator yang berada pada level 5, meningkat menjadi 67 indikator pada tahun 2021. Meski begitu, peningkatan pada jumlah indikator yang berada di level 5 tidak sejalan dengan dengan indikator yang berada di level 1. Pada tahun 2020 terdapat 2 indikator yang masih berada pada level 1, yang kemudian malah bertambah menjadi menjadi 3 indikator pada tahun 2021.

Tabel 5.7
Perkembangan IDSD 2020-2021

No.	Status Progres IDSD	Juml. Indikator
1	Mengalami Penurunan	10
2	Sama	65
3	Mengalami Kenaikan	22
JUMLAH		97

Sumber: Hasil Pengukuran IDSD 2021

Dilihat dari progres dari tahun 2020 ke tahun 2021, terdapat 22 indikator yang mengalami peningkatan. Sebanyak 65 indikator dapat bertahan pada level yang sama pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Sementara itu, terdapat sebanyak 10 indikator yang mengalami penurunan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2021.

Tabel 5.8
Perkembangan IDSD 2020-2021

No	Indikator	2020	2021	Progress
1	Regulasi apa saja yang dijadikan Pedoman dalam menentukan besaran biaya administrasi perizinan memulai bisnis/industri kecil, menengah dan besar?	5	5	☐
2	Berapa Rata-rata durasi waktu pengurusan administrasi izin berusaha yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memulai bisnis/industry?	5	3	☐
3	Berapa persentase peningkatan jumlah perizinan usaha dari tahun sebelumnya?	5	5	☐
4	Berapa persentase industri yang memanfaatkan kebijakan/regulasi insentif pajak untuk proses bisnisnya dari total industri yang ada?	4	5	☐
5	Bagaimana persentase Pertumbuhan usaha/industri kecil dan menengah?	4	5	☐
6	Bagaimana persentase pertumbuhan usaha/industri besar? (Untuk Tingkat Provinsi)	3	5	☐
7	Bagaimana sistem manajemen produk hasil industri kecil dan menengah? (Bisa dalam bentuk SOP dan sertifikat ISO)	5	5	☐

No	Indikator	2020	2021	Progress
8	Bagaimana sistem manajemen produksi hasil industri besar (dalam bentuk sertifikat ISO)? (Untuk Tingkat Provinsi)	5	5	☐
9	Berapa jumlah perusahaan sosial (social enterprise) yang sudah terdaftar oleh Pemerintah Daerah?	5	5	☐
10	Berapa Jumlah perusahaan Startup yang terdaftar di inkubator bisnis perguruan tinggi/Balitbangda/inkubator bisnis swasta?	4	4	☐
11	Bagaimana implementasi Program sistem Inovasi Daerah?	5	5	☐
12	Bagaimana keberadaan dan pengembangan kluster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagai bentuk interaksi dan kolaborasi antara Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang dan Masyarakat?	5	5	☐
13	Berapa jumlah Kolaborasi antara Perguruan Tinggi, Lembaga dan atau litbang dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)	4	5	☐
14	Berapa jumlah perjanjian kerja sama antara industri/dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir?	4	5	☐
15	Berapa jumlah kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang,	5	5	☐

No	Indikator	2020	2021	Progress
	Industri/Badan Usaha dan pemerintah daerah (triple helix) dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)			
16	Berapa Skor/Nilai Indeks Inovasi Daerah pada tahun terakhir?	5	5	☐
17	Berapa jumlah artikel ilmiah jurnal yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan atau lembaga litbang setempat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi / internasional selama 2 tahun terakhir?	5	5	☐
18	Berapa jumlah penelitian yang dihasilkan Perguruan Tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, design Industri, dll) secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?	4	5	☐
19	Jumlah Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, design Industri, dll) di daerah yang sudah didaftarkan secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?	5	5	☐
20	Bagaimana Jumlah paten yang telah dimanfaatkan di industri?	4	5	☐
21	Berapa Persentase anggaran penelitian dan pengembangan terhadap total APBD?	4	4	☐

No	Indikator	2020	2021	Progress
22	Berapa persentase kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) terhadap jumlah penelitian dari Perguruan Tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya?	5	5	☐
23	Berapa persentase jumlah peneliti di Perguruan Tinggi dan perangkat daerah kelitbangan dibanding hasil penelitian yang dipublikasikan dalam 2 tahun terakhir?	5	5	☐
24	Peringkat perguruan tinggi di daerah secara nasional? (Perguruan Tinggi yang berlokasi di daerah dan memiliki Peringkat/Ranking Tertinggi)	5	5	☐
25	Berapa Jumlah dunia usaha dan Industri yang memiliki unit penelitian dan pengembangan?	5	5	☐
26	Berapa Jumlah Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kelitbangan?	5	5	☐
27	Bagaimana jumlah Perguruan tinggi dan institusi kelitbangan di daerah yang telah melakukan komersialisasi inovasi?	5	5	☐
28	Adakah dan Bagaimanakah kondisi Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Techno Park?	5	5	☐
29	Berapa Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon/Smartphone?	5	5	☐
30	Berapa proporsi rumah tangga yang mengakses internet?	5	5	☐
31	Berapa Produk Inovasi Teknologi yang sudah di	5	5	☐

No	Indikator	2020	2021	Progress
	Komersialisasikan?			
32	Apakah hasil penetapan tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional berdasarkan Kementerian Dalam Negeri?	5	5	☐
33	Apakah hasil Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	5	5	☐
34	Apakah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	2	4	☐
35	Apakah hasil Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	3	4	☐
36	Berapa hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)?	4	5	☐
37	Berapa capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi ?	3	5	☐
38	Bagaimana Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan ?	5	5	☐
39	Berapa Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) ?	5	5	☐
40	Berapa rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor ?	5	5	☐
41	Berapa rasio panjang jalan kondisi baik dibanding total panjang jalan (tidak termasuk jalan tol)?	4	5	☐

No	Indikator	2020	2021	Progress
42	Berapa persentase rumah tangga berakses air minum layak ?	3	3	☐
43	Berapa besar persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)?	1	2	☐
44	Berapa rasio elektrifikasi ?	5	5	☐
45	Berapa besar pertumbuhan ekonomi?	4	5	☐
46	Berapa Indeks Kapasitas Fiskal daerah ?	4	4	☐
47	Berapa persentase peningkatan nilai PAD terhadap total pendapatan daerah dari tahun sebelumnya?	2	3	☐
48	Berapa Persentase peningkatan anggaran pemerintah daerah (APBD) terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun sebelumnya?	3	3	☐
49	Berapa Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) untuk tahun terakhir?	4	4	☐
50	Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN Berdasarkan Data tahun terakhir?	5	5	☐
51	Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA Berdasarkan Data tahun terakhir?	3	1	☐
52	Berapa Persentase peningkatan UMKM terhadap UKM dari tahun sebelumnya?	3	4	☐
53	Berapa Persentase Angka Kemiskinan pada tahun terakhir?	3	2	☐

No	Indikator	2020	2021	Progress
54	Berapa persentase Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun terakhir?	4	3	☐
55	Berapa besarnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) pada tahun terakhir?	5	5	☐
56	Berapa Persentase balita gizi buruk pada tahun terakhir?	5	5	☐
57	Berapa Persentase Jumlah Balita Stunting pada tahun terakhir?	5	5	☐
58	Berapa Angka Kematian Bayi/Balita (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun terakhir?	5	5	☐
59	Berapa Persentase antara Jumlah Penduduk yang mengalami Keluhan Kesehatan dan terganggunya aktivitas (JPKK) dengan jumlah Penduduk pada tahun terakhir	4	3	☐
60	Berapa nilai Angka Harapan hidup pada tahun terakhir?	5	5	☐
61	Berapa Rasio puskesmas per 100.000 (seratus ribu) penduduk pada tahun terakhir?	4	5	☐
62	Berapa Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk pada tahun terakhir?	2	5	☐
63	Rasio dokter dan medis terhadap per 100.000 (seratus ribu) penduduk pada tahun terakhir?	5	5	☐
64	Berapa Angka Harapan Lama Sekolah?	4	4	☐
65	Berapa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)?	3	3	☐
66	Berapa Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan	1	1	☐

No	Indikator	2020	2021	Progress
	Tinggi?			
67	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan Diploma I/II/III terhadap total jumlah penduduk?	3	3	☐
68	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan D4/S1 terhadap total jumlah penduduk	5	5	☐
69	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S2 terhadap total jumlah penduduk?	3	4	☐
70	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S3 terhadap total jumlah penduduk?	3	3	☐
71	Berapa persentase Angka Partisipasi Kasar siswa SMA/SMK/Sederajat?	4	5	☐
72	Berapa kenaikan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja pada tahun ini dan tahun sebelumnya?	5	5	☐
73	Berapa jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)?	5	5	☐
74	Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Literasi Digital Penduduk?	5	5	☐
75	Bagaimana pola dan karakteristik pola kemitraan diantara perusahaan (industri kecil, menengah dan besar)?	5	5	☐
76	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha	5	5	☐

No	Indikator	2020	2021	Progress
	Poktan/Gapoktan yang aktif?			
77	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha asosiasi pedagang pasar yang aktif?	5	5	☐
78	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang aktif?	5	5	☐
79	Berapa persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?	2	2	☐
80	Berapa Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)?	5	5	☐
81	Apakah ada Regulasi pemerintah daerah yang mendorong efisiensi pasar dan menekan laju inflasi di daerah?	5	5	☐
82	Bagaimana Tingkat ketimpangan ekonomi (Indeks Gini)?	2	2	☐
83	Berapa Presentase Penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK))?	5	5	☐
84	Bagaimana Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)? (dalam persentase)	4	1	☐
85	Berapa Indeks Pembangunan Gender (IPG)?	5	5	☐
86	Berapa Persentase jumlah tenaga kerja terdidik terhadap total angkatan kerja?	4	5	☐
87	Berapa Persentase Pekerja Penuh Waktu (> 35 Jam) dalam Seminggu?	5	5	☐
88	Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam	5	5	☐

No	Indikator	2020	2021	Progress
	pengembangan tenaga kerja terampil?			
89	Berapa Persentase jumlah Bank di Daerah yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha?	5	5	☐
90	Berapa Persentase jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha?	5	5	☐
91	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?	2	3	☐
92	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) (termasuk didalamnya modal ventura dan fund raising) kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?	5	4	☐
93	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada Petani dan/atau Nelayan?	3	3	☐
94	Bagaimana ketersediaan modal ventura bagi struktur permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah?	4	5	☐
95	Berapa Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas dibanding Jumlah Penduduk? (dalam presentase)	5	5	☐
96	Berapa presentase pertumbuhan nilai ekspor?	5	2	☐
97	Berapa Nilai Neraca Perdagangan Antar Wilayah di Tingkat Provinsi (dalam triliun rupiah)?	5	3	☐

Dengan adanya peningkatan jumlah indikator yang berada di level 5 dibarengi dengan menurunnya indikator yang berada di level 2, serta lebih banyaknya indikator yang mengalami peningkatan level dibandingkan dengan indikator yang mengalami penurunan, Kota Surakarta diindikasikan mengalami peningkatan kemampuan dalam hal daya saing. Peningkatan kemampuan berdaya saing pada level nasional tersebut secara umum berlaku baik dalam hal *enabling environment*, sumber daya manusia, luasnya pasar, dan ekosistem inovasi. Kondisi ini diharap sejalan dengan peningkatan kehidupan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik, maupun penerapan teknologi dan informasi baik pada Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat pada umumnya.

Indeks Daya Saing Kota Surakarta Berdasarkan Aspek

Terdapat 4 aspek yang dijadikan tolok ukur dalam pengukuran Indeks Daya Saing Daerah antara lain; Ekosistem Inovasi, Faktor Penguat (*Enabling Environment*), Sumber Daya Manusia (*Human Capital*), dan Pasar (*Market*). Pada tahun 2021, skor untuk aspek Ekosistem Inovasi Kota Surakarta adalah 4,87/5,00 dan merupakan aspek yang mendapatkan nilai paling baik. Disusul oleh aspek Sumber Daya Manusia, Kota Surakarta memperoleh skor 4,26/5,00. Sementara itu untuk Aspek Faktor Pasar Kota Surakarta, skornya adalah 4,13/5,00. Sedangkan untuk aspek Faktor Penguat merupakan aspek yang paling rendah jika dibandingkan dengan ketiga aspek lainnya, Kota Surakarta mampu mencapai skor 4,04/5,00.

Tabel 5.9
IDSD Kota Surakarta Berdasarkan Aspek 2018-2021

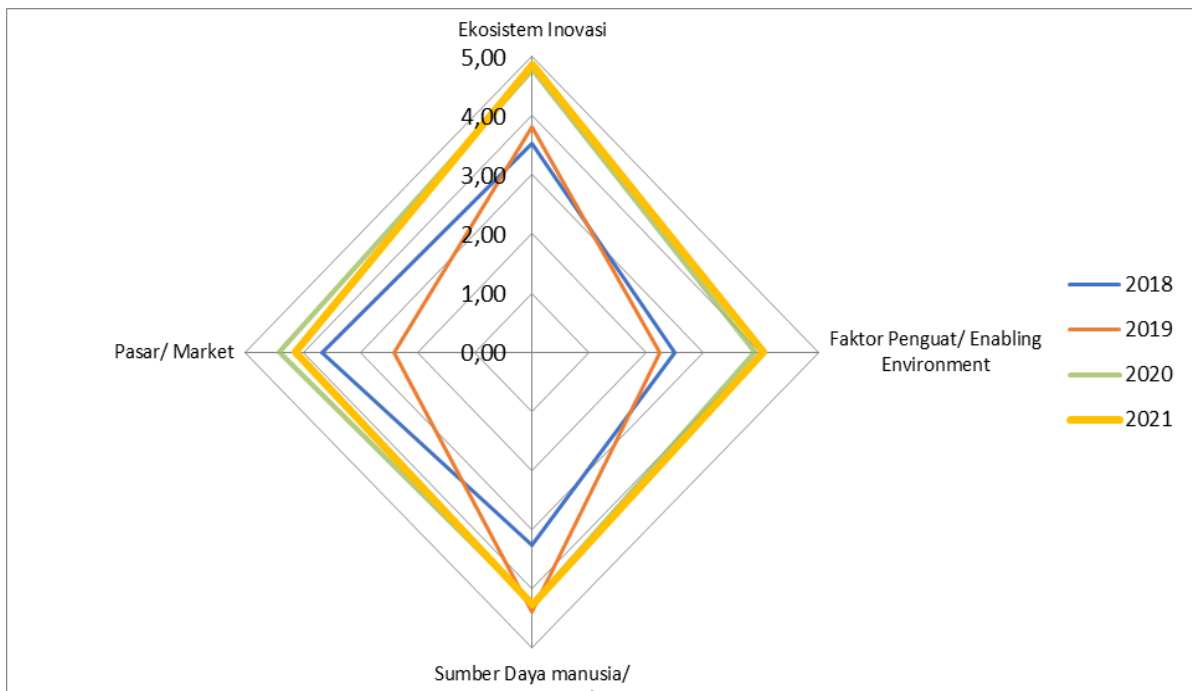
No.	Aspek	2018	2019	2020	2021
1	Ekosistem Inovasi	3,53	3,80	4,77	4,87
2	Faktor Penguat/ Enabling Environment	2,49	2,23	3,89	4,04
3	Sumber Daya manusia/ Human Capital	3,27	4,40	4,25	4,26
4	Pasar/ Market	3,67	2,42	4,42	4,13

Sumber: Hasil Pengukuran IDSD 2021

Secara keseluruhan, skor pada keempat aspek pada tahun 2021 merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan skor pada tahun 2018-2020. Meskipun secara parsial skor aspek Sumber Daya Manusia dan Faktor Pasar masih kalah dengan raihan tertinggi yang pernah diperoleh Kota Surakarta (4,25 dan 4,42), namun peningkatan secara akumulatif terjadi pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya. Skor Faktor Penguat meningkat dari 3,89 menjadi 4,04 pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Skor Ekosistem Inovasi juga mengalami peningkatan dari 4,77 menjadi 4,94 pada tahun 2021.

Menurunnya aspek Sumber Daya Manusia dan Faktor Pasar merepresentasikan bahwa daya saing Surakarta dalam hal pencetakan sumber daya manusia terdidik dan memiliki keterampilan mengalami perlemahan, serta semakin menurunnya kemampuan Kota Surakarta untuk menarik investor baik dari dalam daerah maupun luar daerah untuk menanamkan modal di Kota Surakarta. Kondisi tersebut juga perlu mempertimbangkan neraca perdagangan yang terjadi di Kota Surakarta, yang mendindikasikan bahwa jumlah impor ke dalam daerah lebih besar dibandingkan dengan jumlah ekspor ke luar daerah. Sementara itu, peningkatan pada aspek ekosistem inovasi mencerminkan semakin menguatnya tingkat pemahaman dan penggunaan teknologi informatika serta kemampuan daerah untuk meningkatkan bisnis berbasis startup.

Gambar 5.1
Diagram Aspek IDSD Kota Surakarta 2018-2021



Sumber: Hasil Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah 2021

Apabila direfleksikan dalam bentuk diagram radar seperti pada gambar 5.1, diindikasikan bahwa semakin luas cakupan wilayah maka semakin mendekati kemampuan daya saing yang sempurna. Kota Surakarta menunjukkan progress bahwa tahun 2021 semakin meningkat kemampuan daya saing daerahnya berdasarkan aspek, direfleksikan dengan cakupan area yang semakin luas atau memenuhi keseluruhan radar.

Indeks Daya Saing Kota Surakarta Berdasarkan Pilar

Secara lebih spesifik daripada aspek, Indeks Daya Saing Daerah diukur berdasarkan 12 pilar yang meliputi:

Aspek Ekosistem Inovasi

1. Pilar Dinamika Bisnis
2. Pilar Kapasitas Inovasi
3. Pilar Kesiapan Teknologi

Aspek Faktor Penguat

1. Pilar Tata Kelola Pemerintahan
2. Pilar Infrastruktur
3. Pilar Perekonomian Daerah

Aspek Human Capital

1. Pilar Kesehatan
2. Pilar Pendidikan & Keterampilan

Aspek Pasar

1. Pilar Efisiensi Pasar Produk
2. Pilar Ketenagakerjaan
3. Pilar Akses Keuangan
4. Pilar Ukuran Pasar

Pada tahun 2021, pilar yang paling berkontribusi terhadap kemampuan daya saing Kota Surakarta adalah Kesiapan Teknologi, yaitu dengan skor 5,00 atau berada pada tingkat yang paling puncak. Setelah itu, terdapat pilar lain yang menyumbang skor lebih dari 4,50 antara lain adalah Kapasitas Inovasi dengan skor 4,94, pilar Dinamika Bisnis dengan skor 4,70 dan pilar Kelembagaan dengan skor 4,75. Sementara itu, terdapat 3 pilar yang masih berada pada skor di bawah 4,00 antara lain adalah pilar Pendidikan dan Keterampilan dengan skor 3,91; pilar Perekonomian Daerah dengan skor 3,33; dan pilar Ukuran Pasar dengan skor 2,50.

Tabel 5.10
IDSD Kota Surakarta Berdasarkan Pilar 2018-2021

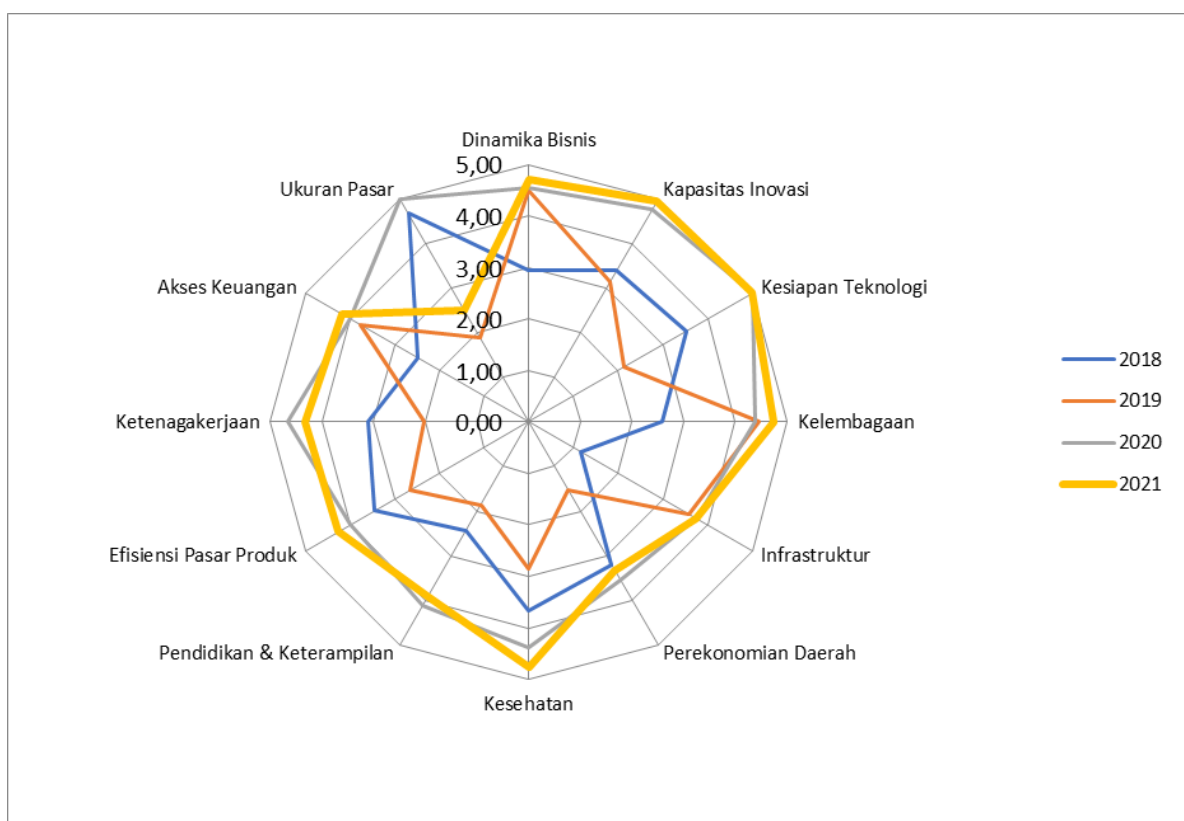
No.	Pilar	2018	2019	2020	2021
1	Dinamika Bisnis	2,93	4,49	4,54	4,70
2	Kapasitas Inovasi	3,41	3,14	4,78	4,94
3	Kesiapan Teknologi	3,53	2,14	5,00	5,00
4	Kelembagaan	2,59	4,46	4,38	4,75
5	Infrastruktur	1,17	3,57	3,75	3,75
6	Perekonomian Daerah	3,22	1,52	3,55	3,33
7	Kesehatan	3,67	2,86	4,38	4,75

8	Pendidikan & Keterampilan	2,45	1,86	4,13	3,91
9	Efisiensi Pasar Produk	3,45	2,65	4,00	4,25
10	Ketenagakerjaan	3,11	2,03	4,67	4,33
11	Akses Keuangan	2,47	3,75	4,00	4,17
12	Ukuran Pasar	4,67	1,90	5,00	2,50

Sumber: Hasil Pengukuran IDSD 2021

Terdapat fluktuasi naik/ turun skor IDSD Kota Surakarta dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Hampir semua pilar mengalami peningkatan di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, kecuali pada pilar Pendidikan dan Keterampilan yang menurun dari 4,13 menjadi 3,91; pilar Ketenagakerjaan dari 4,67 menjadi 4,33; dan pilar Ukuran Pasar dari 5,00 menjadi 2,50. Skor di hampir semua pilar pada tahun 2021 merupakan skor terbaik jika dibandingkan dengan skor pilar pada IDSD tahun 2018-2020.

Gambar 5.2
Diagram Skor Pilar IDSD Kota Surakarta 2018-2021



Sumber: Hasil Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah 2021

Apabila direfleksikan dalam bentuk diagram radar seperti pada gambar 5.2, diindikasikan bahwa semakin luas cakupan wilayah maka semakin mendekati kemampuan daya saing yang sempurna. Kota Surakarta menunjukkan progress bahwa tahun 2021 semakin meningkat kemampuan daya saing daerahnya berdasarkan pilar, direfleksikan dengan cakupan area yang semakin luas atau memenuhi keseluruhan radar.

Indeks Daya Saing Kota Surakarta Berdasarkan Dimensi

Dalam klasifikasi yang lebih spesifik daripada berdasarkan pilar, IDSD 2021 diukur berdasarkan dimensi. Terdapat 23 dimensi pengukuran yang tercakup dari 4 aspek dan 12 pilar meliputi;

Aspek Ekosistem Inovasi	Aspek Faktor Penguat
1. Pilar Dinamika Bisnis a. Regulasi b. Kewirausahaan	1. Pilar Kelembagaan a. Tata Kelola Pemerintahan b. Keamanan & Ketertiban
2. Pilar Kapasitas Inovasi a. Interaksi & Keberagaman b. Penelitian & Pengembangan c. Komersialisasi	2. Pilar Infrastruktur a. Infrastruktur & Transportasi b. Air Bersih, RTH, dan Kelistrikan
3. Pilar Kesiapan Teknologi a. Telematika b. Teknologi	3. Pilar Perekonomian Daerah a. Keuangan Daerah b. Stabilitas Ekonomi

Aspek Human Capital	Aspek Pasar
1. Pilar Kesehatan a. Kesehatan	1. Pilar Efisiensi Pasar Produk a. Kompetisi Dalam Negeri b. Pajak & Retribusi c. Stabilitas Pasar

2. Pilar Pendidikan & Keterampilan	2. Pilar Ketenagakerjaan
a. Pendidikan	a. Ketenagakerjaan
b. Keterampilan	b. Kapasitas Tenaga Kerja
	3. Pilar Akses Keuangan
	a. Akses Keuangan
	4. Pilar Ukuran Pasar
	b. Ukuran Pasar

Pada tahun 2021, dimensi yang berkontribusi paling besar bagi daya saing Kota Surakarta antara lain adalah Keamanan & Ketertiban; Infrastruktur Transportasi; Keterampilan; Kompetisi Dalam Negeri; Kapasitas Tenaga Kerja; Regulasi; Komersialisasi; Telematika; serta Teknologi karena masing-masing dimensi menyumbang skor 5,00. Terdapat juga beberapa dimensi yang menyumbang skor di atas 4,50 antara lain Tata Kelola Pemerintahan (4,67); Kesehatan (4,75); dan Kewirausahaan (4,86). Sementara itu, beberapa dimensi masih menunjukkan skor yang kurang bagus, atau masih berada di bawah angka 3,50, antara lain adalah Infrastruktur Air Bersih, RTH dan Kelistrikan (3,33); Stabilitas Ekonomi (3,43); Pendidikan (3,29); dan Ukuran Pasar (3,33).

Tabel 5.11
IDSD Kota Surakarta Berdasarkan Dimensi 2018-2021

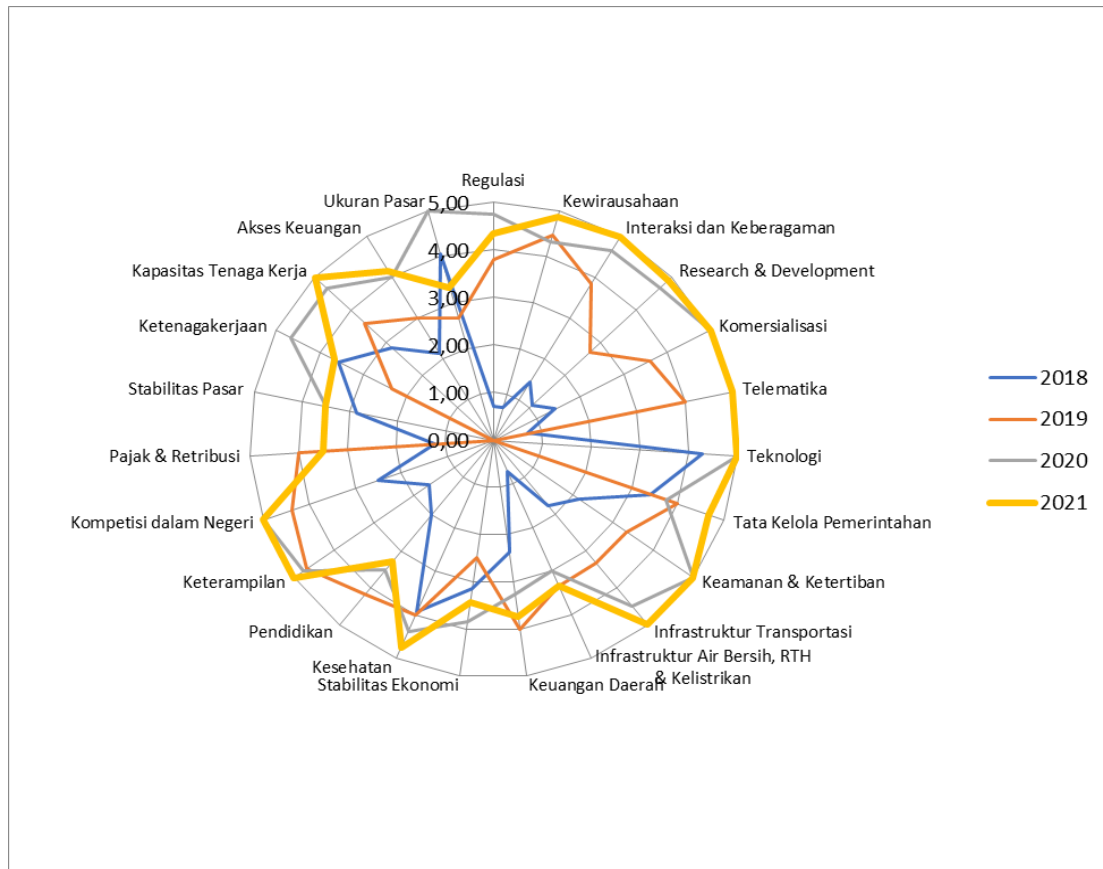
No.	Dimensi	2018	2019	2020	2021
1	Regulasi	0,71	3,80	4,75	4,33
2	Kewirausahaan	0,71	4,47	4,33	4,86
3	Interaksi dan Keberagaman	1,43	3,84	4,67	5,00
4	Research & Development	1,07	2,71	4,67	4,90
5	Komersialisasi	1,43	3,60	5,00	5,00
6	Telematika	0,71	4,00	5,00	5,00
7	Teknologi	4,29	0,00	5,00	5,00
8	Tata Kelola Pemerintahan	3,39	4,00	3,75	4,67
9	Keamanan & Ketertiban	2,14	3,33	5,00	5,00
10	Infrastruktur Transportasi	1,79	3,33	4,50	5,00
11	Infrastruktur Air Bersih, RTH & Kelistrikan	0,71	3,33	3,00	3,33

12	Keuangan Daerah	2,38	4,00	3,25	3,75
13	Stabilitas Ekonomi	3,14	2,50	3,86	3,43
14	Kesehatan	3,93	4,00	4,38	4,75
15	Pendidikan	2,02	4,17	3,50	3,29
16	Keterampilan	1,61	4,67	4,75	5,00
17	Kompetisi dalam Negeri	2,50	4,38	5,00	5,00
18	Pajak & Retribusi	1,19	4,00	3,50	3,50
19	Stabilitas Pasar	2,86	0,00	3,50	3,50
20	Ketenagakerjaan	3,57	2,33	4,67	3,67
21	Kapasitas Tenaga Kerja	2,86	3,60	4,67	5,00
22	Akses Keuangan	2,14	3,00	4,00	4,17
23	Ukuran Pasar	4,05	2,67	5,00	3,33

Sumber: Hasil Pengukuran IDSD 2021

Secara keseluruhan, daya saing Kota Surakarta berdasarkan dimensi pada tahun 2021 merupakan yang terbaik apabila dibandingkan dengan tahun 2018-2020. Peningkatan signifikan terjadi pada dimensi Tata Kelola Pemerintahan, dimana pada tahun 2021 skor yang diperoleh adalah 4,67 meningkat dari tahun sebelumnya (3,75). Peningkatan signifikan juga terjadi pada dimensi Infrastruktur Transportasi, dimana skor 4,50 pada tahun 2020 meningkat menjadi 5,00 pada tahun 2021. Meskipun secara keseluruhan tahun 2021 merupakan yang terbaik berdasarkan dimensi, masih terdapat 4 dimensi yang belum mencapai skor tertinggi yang sebelumnya pernah dicapai Kota Surakarta dalam rentang 2018-2020. Stabilitas Ekonomi pada tahun 2021 meraih skor 3,43 belum mampu mencapai raihan terbaik pada tahun 2020(3,86). Skor pada dimensi Pendidikan pada tahun 2021 (3,29) juga belum menyamai perolehan skor pada tahun 2019 (4,17), serta dimensi Ukuran Pasar pada tahun 2021 (3,33) yang belum mampu mencapai raihan terbaik pada tahun 2020 (5,00).

Gambar 5.3
Diagram Skor Dimensi IDSD Kota Surakarta 2018-2021



Sumber: Hasil Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah 2021

Apabila direfleksikan dalam bentuk diagram radar seperti pada gambar 5.3, diindikasikan bahwa semakin luas cakupan wilayah maka semakin mendekati kemampuan daya saing yang sempurna. Kota Surakarta menunjukkan progress bahwa tahun 2021 semakin meningkat kemampuan daya saing daerahnya berdasarkan dimensi, direfleksikan dengan cakupan area yang semakin luas atau memenuhi keseluruhan radar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan pemetaan Indeks Daya Saing Kota Surakarta tahun 2021, serta analisis trend IDSD tahun 2018-2021, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kota Surakarta merupakan daerah yang memiliki tingkat daya saing sangat baik. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2020 sampai 2021 indikator yang mengalami kenaikan ada 22 indikator, sedangkan yang mengalami penurunan hanya ada 10 indikator, sisanya 65 indikator masih sama. Daya saing Kota Surakarta ini di dukung oleh sector kontruksi, perdagangan, dan informasi komunikasi terhadap PDRB. Sektor konstruksi merupakan penyumbang PDRB tertinggi dalam tiga tahun terakhir dengan kontribusi sebesar 27% pada tahun 2020.
2. Secara umum Indeks daya saing daerah kota Surakarta tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan skor 4,385. Indicator yang mengalami penurunan adalah indicator yang bersifat makro, hal ini dipengaruhi olehh factor kondisi saat ini dengan adanya pandemic *covid 19* yang melanda dunia. Sedangkan indicator yang bersifat mikro jangka Panjang cenderung stabil dan mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 Indeks Daya Saing Kota Surakarta berdasarkan dari 97 indikator menunjukkan sebaran level daya saing sudah di dominasi pada level 5 yaitu sebanyak 67 indikator, sementara terdapat 3 indikator yang merupakan level 1, 5 indikator di level 2, dan 10 indikator di level 4.
3. Indeks Daya Saiang Kota Surakarta berdasarkan aspek, pada tahun 2021 skor tertinggi terdapat pada aspek Ekosistem Inovasi Kota Surakarta, di urutan kedua pada aspek Sumber Daya Manusia, disusul Aspek pasar. Secara keseluruhan, skor pada keempat aspek pada tahun 2021 merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan skor pada tahun 2018-2020. Meskipun secara parsial skor aspek Sumber Daya Manusia dan Faktor Pasar masih kalah dengan raihan tertinggi yang pernah diperoleh Kota Surakarta (4,25 dan 4,42), namun peningkatan secara akumulatif terjadi pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya. Skor Faktor Penguat

meningkat dari 3,89 menjadi 4,04 pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Skor Ekosistem Inovasi juga mengalami peningkatan dari 4,77 menjadi 4,94 pada tahun 2021

4. Indeks daya saing Kota Surakarta berdasarkan Pilar pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan pilar IDSD yang paling berkontribusi terhadap kemampuan daya saing Kota Surakarta adalah Kesiapan Teknologi, yaitu dengan skor 5,00 atau berada pada tingkat yang paling puncak. Setelah itu, terdapat pilar lain yang menyumbang skor lebih dari 4,50 antara lain adalah Kapasitas Inovasi dengan skor 4,94, pilar Dinamika Bisnis dengan skor 4,70 dan pilar Kelembagaan dengan skor 4,75 Sementara itu, terdapat 3 pilar yang masih berada pada skor di bawah 4,00 antara lain adalah pilar Pendidikan dan Keterampilan dengan skor 3,91; pilar Perekonomian Daerah dengan skor 3,33; dan pilar Ukuran Pasar dengan skor 2,50.
5. Secara keseluruhan Indeks Daya saing Kota Surakarta berdasarkan dimensi pada tahun 2021 merupakan yang terbaik dibanding tahun 2018-2020. Dimensi yang memberikan kontribusi paling besar bagi daya saing Kota Surakarta antara lain adalah Keamanan & Ketertiban; Infrastruktur Transportasi; Keterampilan; Kompetisi Dalam Negeri; Kapasitas Tenaga Kerja; Regulasi; Komersialisasi; Telematika; serta Teknologi karena masing-masing dimensi menyumbang skor 5,00. Terdapat juga beberapa dimensi yang menyumbang skor di atas 4,50 antara lain Tata Kelola Pemerintahan (4,67); Kesehatan (4,75); dan Kewirausahaan (4,86). Peningkatan signifikan terjadi pada dimensi Tata Kelola Pemerintahan, dimana pada tahun 2021 skor yang diperoleh adalah 4,67 meningkat dari tahun sebelumnya (3,75).

B. Proyeksi Indeks Daya Saing Kota Surakarta tahun 2022

Berdasar pada RPJMD Tahun 2021-2026, tahun 2022 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta lima tahun ke depan. Melalui arah kebijakan pembangunan tahun 2022 yang ditujukan untuk “Penguatan Perekonomian Daerah Melalui Sektor pariwisata yang terintegrasi dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal”, prioritas pembangunan daerah diarahkan pada:

1. Pemenuhan layanan kesehatan dan Pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19;
2. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan melanjutkan jaminan sosial;
3. Pemasaran pariwisata dengan fokus: wisata sejarah, kota MICE, Wiskulja (Wisata Kuliner dan belanja), seni budaya, olahraga, kesehatan dan ekonomi digital berbasis konsep *Eco Cultural City*;
4. Pembinaan kompetensi dan kualitas pemuda, perempuan, dan kelompok rentan untuk produktif, adaptif, dan kompetitif;
5. Penataan organisasi tata kerja dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah menyesuaikan perubahan regulasi yang berlaku dan perkembangan normal baru;
6. Inisiasi Kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - a. Pemasaran kota melalui event budaya dan olahraga
 - b. Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya local
 - c. Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha
 - d. Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional
 - e. Pengentasan Kemiskinan
 - f. Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya.
7. Pengembangan sistem pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jawa berbasis teknologi informasi menuju *smart education*; dan
8. Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif berbasis teknologi informasi dan kearifan nilai budaya lokal mewujudkan kota cerdas (*smart city*).

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, tingkat optimisme hasil Indeks Daya Saing Kota Surakarta ditahun 2022 akan mengalami kenaikan dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

C. Rekomendasi

1. Rekomendasi Kebijakan berdasarkan hasil analisis IDSD Kota Surakarta 2021

Berdasarkan hasil pengisian terhadap kuesioner IDSD tahun 2021, masih terdapat 3 indikator yang menempatkan Kota Surakarta pada level 1, dan 5 indikator pada level 2. Dengan kata lain, masih terdapat 8 hal yang sangat perlu diperhatikan dan ditingkatkan untuk memperbaiki kemampuan daya saing Kota Surakarta di level nasional. Mengacu pada 8 indikator yang masih memperoleh skor level 1 (paling rendah) dan 2, serta temuan-temuan lapangan maupun data *desk* yang dijadikan bukti fisik pengisian kuesioner IDSD, terdapat hal yang perlu dipertimbangkan bagi seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, dunia usaha, akademi, masyarakat, dan media) dalam peningkatan daya saing Kota Surakarta, yaitu adalah:

- a. Jumlah nilai investasi berskala PMA hanya sebesar US\$2.282.000.
 - 1) Regulasi terkait penyederhanaan prosedur dan waktu proses perijinan usaha;
 - 2) Optimalisasi perijinan secara daring dan peningkatan kualitas website/aplikasi perijinan usaha
- b. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi hanya sebesar 22,62%.
 - 1) Kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi negeri/swasta, dan dunia usaha terkait program beasiswa, magang, dan penempatan kerja untuk meningkatkan minat studi lanjut.
- c. Masih terdapat sebanyak 7,92 tingkat pengangguran terbuka.
 - 1) Peningkatn jumlah peserta pelatihan di BLK terutama untuk pelatihan startup bisnis;
 - 2) Peningkatan kapasitas dan fasilitasi pada incubator bisnis di Solo Technopark;
- d. Hanya terjadi pertumbuhan nilai ekspor dari luar daerah ke dalam daerah sebesar 5,38%.
 - 1) Monitoring dan evaluasi terhadap produk unggulan daerah;

- 2) Pendataan kembali produk asli/ local yang dibawa ke luar daerah untuk diekspor (menghindari tidak tercatatnya transaksi ekspor produk Surakarta yang dilakukan oleh eksportir local yang lokasi transaksinya dilakukan di Kota lain)
- e. Meski terjadi peningkatan dibanding tahun 2020, koefisien Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surakarta masih rendah, atau hanya sebesar 11,7%.
- 1) Kota Surakarta memiliki RTH yang masih belum disurvei dan didata;
 - 2) Pengukuran dan pendataan kembali KDH untuk mengantisipasi jumlah RTH yang belum dihitung
- f. Persentase angka kemiskinan masih besar yaitu 9%, meskipun angka ini tidak berbeda jauh dengan angka provinsi maupun nasional, tapi berdasarkan indeks daya saing, persentase angka kemiskinan tersebut masih relatif tinggi.
- 1) Fasilitasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga keuangan bank/ non bank, serta lembaga penyalur amal & zakat untuk distribusi kesejahteraan yang lebih tepat sasaran;
 - 2) Pembinaan penggunaan dana bantuan/ charity untuk keperluan membuka usaha dan pengembangan usaha
- g. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 61%, yaitu Rp 370.000.000.000 dibandingkan dengan PAD sebesar Rp 610.373.869.673. Untuk meningkat secara bertahap pada level yang lebih baik (3), diperlukan kontribusi pajak daerah sebesar >70%.
- 1) Monitoring dan evaluasi pajak & retribusi untuk menghindari kebocoran penyetoran pajak;
 - 2) Sosialisasi penggunaan insentif pajak UMKM;
- h. Masih terjadi tingkat ketimpangan ekonomi sebesar 3,59. Meskipun angka ini mengacu pada angka provinsi, namun Kota Surakarta perlu untuk turut menurunkan angka ketimpangan tersebut.
- 1) Fasilitasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga keuangan bank/ non bank, serta lembaga penyalur amal & zakat untuk distribusi kesejahteraan yang lebih tepat sasaran;

- 2) Pembinaan penggunaan dana bantuan/ charity untuk keperluan membuka usaha dan pengembangan usaha

2. Rekomendasi recovery pemulihan ekonomi dan rekayasa sosial masyarakat Kota Surakarta di masa pandemi *Covid 19*.

Dukungan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 terhadap daya saing daerah merupakan perencanaan strategis yang relevan karena penunjang terhadap daya saing daerah merupakan kebutuhan yang mendesak terlebih yang bersentuhan dengan penerapan inovasi teknologi dan digitalisasi terutama di masa 5 tahun ke depan yang merupakan tahun-tahun responsif dan adaptif terhadap dampak pandemi global Covid-19.

Adapun rekomendasi program pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid 19 meliputi:

- a. Fasilitasi pelaku UMKM, memperoleh fasilitas restrukturisasi kredit dan pemberian sarana usaha akibat terdampak Covid-19
- b. Memfasilitasi para pelaku sektor pariwisata dan industri kreatif dalam pelaksanaan protokol new normal agar dapat bangkit kembali dan membantu keringanan pajak daerah melalui Pengembangan *Sport Tourism* dan *Wellness Tourism*.
- c. Penjaminan ketersediaan bahan pokok, dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat
- d. Optimalisasi peran Kantor Kelurahan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), bekerja sama dengan RT/RW membentuk Kampung Siaga Covid-19 untuk kewaspadaan dan pencegahan Covid-19 dalam program penanggulangan bencana
- e. Pendataan dan konsolidasi program bantuan sosial (tunai dan non tunai) untuk warga miskin dan rentan miskin, baik yang berasal dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- f. Peningkatan Program Padat Karya Tunai terutama untuk korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkley, D. L. (2008). Evaluations of regional competitiveness: Making a case for case studies. *Review of Regional Studies*, 38 (2), 121-143.
- Berger, T. (2008). Concepts of national competitiveness. *Journal of international Business and Economy*, 9 (1), 91-111.
- Bristow, G. (2005). Everyone's a 'winner': problematising the discourse of regional competitiveness. *Journal of economic geography*, 5 (3), 285-304.
- Coccia, M. (2011). The interaction between public and private R&D expenditure and national productivity. *Prometheus*, 29 (2), 121-130.
- Daryanto, A. (2004). Keunggulan daya saing dan teknik identifikasi komoditas unggulan dalam mengembangkan potensi ekonomi regional.
- De la Vega, J. C. S., Azorín, J. D. B., Segura, A. C. F., & Yago, M. E. (2019). A new measure of regional competitiveness. *Applied Economic Analysis*.
- Delgado, M., Ketels, C., Porter, M. E., & Stern, S. (2012). *The determinants of national competitiveness* (No. w18249). National Bureau of Economic Research.
- Dinata, R. J., & Hidayat, P. (2015). Analisis Daya Saing Ekonomi Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3 (1), 14831.
- Górski, M., Kochel, A., & Szymańska-Buzar, T. (2004). Synthesis, structure, and unusual reactivity of the first norbornene carbonyl complexes of tungsten. *Organometallics*, 23 (12), 3037-3046.
- Huggins, R., Izushi, H., & Thompson, P. (2013). Regional competitiveness: theories and methodologies for empirical analysis. *Journal of CENTRUM Cathedra: The Business and Economics Research Journal*, 6 (2), 155-172.
- Porter, M. E. (2010). Microeconomics of competitiveness. *Institute for Competitiveness and Strategy, Harvard*.
- Ritonga, S. A. W., & Hidayat, P. (2015). Analisis Daya Saing Ekonomi Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3 (5), 14855.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

Szczepaniak, I. Competitiveness–Systemic Approach. *KNOWLEDGE ECONOMY SOCIETY*,
217.



JL. JEND. SUDIRMAN NO.2, KP. BARU, KEC. PS. KLIWON, KOTA SURAKARTA
JAWA TENGAH 57133
TELP. (0271) 655 277